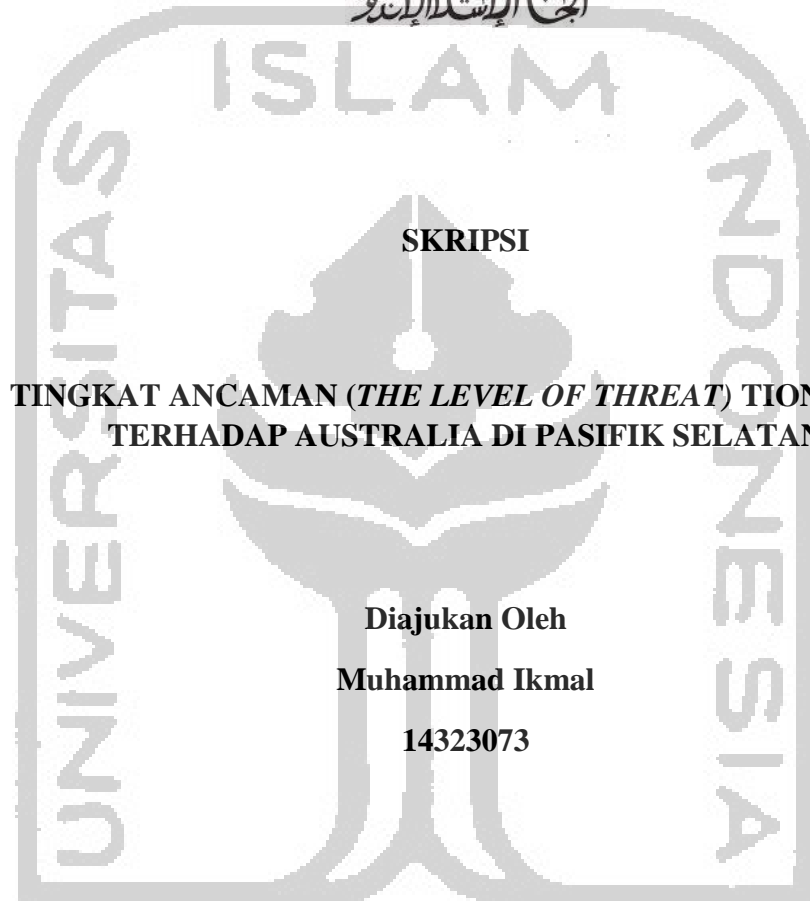


الجامعة الإسلامية
INDONESIA



SKRIPSI

**TINGKAT ANCAMAN (*THE LEVEL OF THREAT*) TIONGKOK
TERHADAP AUSTRALIA DI PASIFIK SELATAN**

**Diajukan Oleh
Muhammad Ikmal**

14323073



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2019

**TINGKAT ANCAMAN (*THE LEVEL OF THREAT*) TIONGKOK
TERHADAP AUSTRALIA DI PASIFIK SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD IKMAL

14323073

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul:
TINGKAT ANCAMAN (*THE LEVEL OF THREAT*) TIONGKOK
TERHADAP AUSTRALIA DI PASIFIK SELATAN**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

03 DEC 2019

Oleh:

Muhammad Ikmal

14323073

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

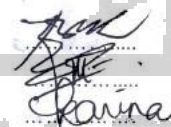
Ketua Program Studi

Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Hanga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
2. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
3. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ikmal

No. Mahasiswa : 14323073

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : TINGKAT ANCAMAN (THE LEVEL OF THREAT) TIONGKOK
TERHADAP AUSTRALIA DI PASIFIK SELATAN

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain
2. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Penelitian ini saya persembahkan kepada :

Ayah dan Ibu

Teruntuk ayah dan ibu, apa yang aku dapatkan hari ini belum mampu untuk membayar semua kebaikan, keringat dan tangismu. Namun izinkan aku untuk mengucapkan rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya atas segala do'a, dukungan moral, nasehat hidup, dan cinta yang telah kalian berikan sehingga aku bisa mempersembahkan secarik kertas hasil perjuanganku.

Saudara-saudaraku

Untuk saudaraku yang tertua yaitu Pandu Suryandi, terimakasih sudah memberikan support selama ini. Dan untuk adik-adikku yaitu Robi Shodri dan Ibrahimovich, semoga kelak engkau mampu melebihi kakakmu dalam prestasi di pendidikan sekaligus kehidupan dunia dan akhirat yang tidak lama lagi akan kau jalani. Prestasimu harus lebih baik dari kedua kakakmu ini dan maafkan jika kami hingga saat ini masih berupaya menjadi saudara yang baik bagi kalian berdua.

HALAMAN MOTTO

“Terserah jurus apa yang kau punya, tapi jika kamu hanya berdiam diri, sama halnya engkau tidak punya mimpi”

Naruto Uzumaki

“Jangan pernah ragu pada apapun yang kamu percayai,
Jangan pernah percaya pada apapun yang kamu
ragukan”

Kaisar Dinasti Qin –

“ Kau gagal tetapi masih bisa mampu bangkit kembali,
karena itu menurutku arti kuat yang sebenarnya”

Hinata Hyuuga

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang berkat rahmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, sebagai salah syarat menyelesaikan perkuliahan. Sholawat beriringan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa prosesnya tak lepas dari bimbingan, dorongan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu mengalir rahmat-Nya tanpa henti kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis yaitu ibunda Israwati dan Ayahanda Yonnevi yang perannya tidak dapat dideskripsikan dengan kata serta kalimat terindah sekalipun, karena begitu sempurna dan tak tergantikan jasanya sebagai guru sekaligus pendorong utama bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan selalu memotivasi agar penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan sempurna dan tepat waktu. Serta selaku Dosen penulis yang selalu menyemangati, memberikan curahan ilmunya begitu besar tanpa membedakan, dan yang terpenting adalah beliau tidak pernah berubah memandang penulis sebagai murid didiknya yang perlu ditunjuk ajar kearah yang benar dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak yang telah penulis lakukan. Semoga Ilmu yang Bapak berikan menjadi amalan yang terus mengalir.
6. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional UII yang dengan ikhlas membimbing, memberikan ilmu, dan meluangkan waktunya agar dapat mencetak generasi-generasi yang Ulil Albab. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang tidak terkira dan arah yang tidak disangka-sangka.
7. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah membantu segala pengurusan baik administrasi maupun non-administrasi perkuliahan dan juga memberikan pelayanan terbaiknya selama penulis meminta pertolongan. Semoga Allah melancarkan semua urusannya.
8. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani kehidupan penulis, Alfaisal, Sabtha, Faisal Fahmi, Frisky, Rikin, Yudo, Fikri, Mizi, Andiasta, Tezar, Anang, Firman semoga diperlancar segala urusan di dunia dan akhirat.
9. Saudara-saudariku yang dipertemukan dalam menjalani kehidupan di Jogjakarta, Aufa andiani, Azeem, Galang, Olky Surya Pramoldi-Meli Pramoldi-Aiden, Fariz, Bintar, Faheem, Adila, Haviz Jo, Thalia dan juga

teman-teman yang tiada dapat kusebutkan namanya satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan menyemangati bahkan atas apapun yang terjadi kepada penulis tanpa pernah menyerah.

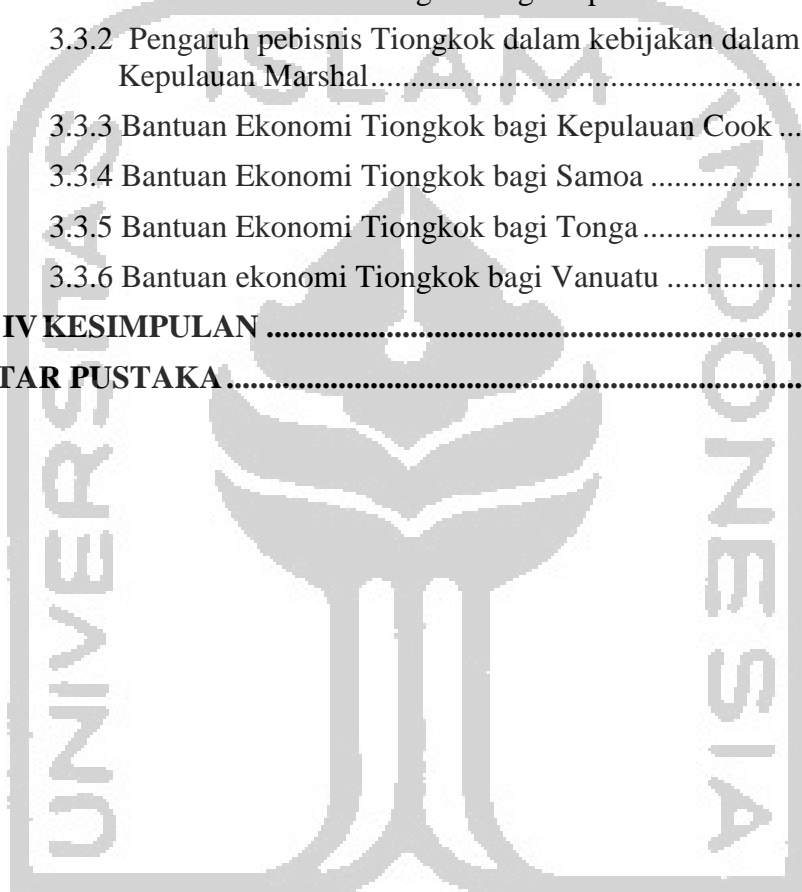
10. Welny Noverianti, yang tidak pernah berhenti untuk percaya pada penulis, yang tidak pernah lelah untuk menghibur dan memberikan dukungan ketika penulis sedang pada masa-masa sulit. Selalu ada dan sedia saat penulis membutuhkan bantuan. Semoga Allah segera mempertemukan kita agar dapat berjuang dalam jalur kehidupan yang sama.
11. Teman-teman seangkatan Hubungan Internasional yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan selama lima tahun ini.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viiviii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	xi
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Signifikansi Penelitian	6
1.5 Cakupan Penelitian	7
1.6 Tinjauan Pustaka	7
1.7 Landasan Konsep	11
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.3 Proses Penelitian	15
BAB II ANALISIS TINGKAT ANCAMAN TIONGKOK BAGI AUSTRALIA: AGGREGATE POWER & PROXIMITY	17
2.1 <i>Aggregate Power</i>	17
2.2 <i>Proximity</i>	22
BAB III ANALISIS TINGKAT ANCAMAN TIONGKOK BAGI AUSTRALIA: OFFENSIVE CAPABILITY & OFFENSIVE INTENTION	27
3.1 <i>Offensive Capability</i>	27
3.1.1 Pengalaman Konflik Militer Kedua Negara Dalam 100 Tahun Terakhir	29
3.1.2 Kecakapan <i>People Liberation Army (PLA)</i> Tiongkok Dalam Militer Global	30
3.1.3 Kemampuan Tiongkok Dalam Menjalin Kerja Sama Militer.....	31
3.2 <i>Offensive Intention</i>	33
3.2.1 Upaya pendanaan Tiongkok atas kamp militer Blackrock di Fiji..	33

3.2.2	Belt Road Initiative(BRI).....	35
3.2.3	RAMSI, peran Australia dalam politik dalam negeri Solomon dan pengaruh Tiongkok.....	37
3.2.4	Tiongkok berupaya membangun pangkalan militer di Vanuatu	39
3.2.5	Intervensi tidak langsung atas pemberlakuan sanksi Kudeta Militer di Fiji	40
3.3	Strategi Jeratan Hutang Tiongkok	42
3.3.1	Bantuan ekonomi Tiongkok bagi Kepulauan Solomon	43
3.3.2	Pengaruh pebisnis Tiongkok dalam kebijakan dalam negeri Kepulauan Marshal.....	45
3.3.3	Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Kepulauan Cook	46
3.3.4	Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Samoa	47
3.3.5	Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Tonga.....	49
3.3.6	Bantuan ekonomi Tiongkok bagi Vanuatu	50
BAB IV KESIMPULAN		53
DAFTAR PUSTAKA.....		57



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar

Gambar 2. 1 Grafik Tren alokasi dana pertahanan Tiongkok dan Australia periode 2013-2018.....	21
---	----

Tabel

Tabel 2.1 Posisi Populasi penduduk Tiongkok-Australia di dunia.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 2.2 Angka Pasukan Militer Tiongkok-Australia.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3 Dana pertahanan Tiongkok dan Australia periode 2013-2018	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 3. 1 Persenjataan Militer Tiongkok – Australia.....	28
Tabel 3. 2 Konflik dan perang yang diikuti Australia-Tiongkok dalam 100 tahun terakhir.....	29
Tabel 3. 3 Nilai Bantuan Investasi terkait Belt Road Initiative (BRI) Tiongkok di Kepulauan Pasifik.....	36
Tabel 3. 4 Tingkat Ancaman Tiongkok terhadap Australia di negara kawasan Pasifik Selatan	51

ABSTRAK

Pasifik Selatan adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritori yang kecil. Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Sedangkan Australia sendiri juga negara di kawasan yang memiliki luas wilayah, populasi dan kekuatan militer terbesar di kawasan Pasifik Selatan sehingga menjadi salah satu aktor utama di kawasan tersebut. Namun hubungan kerja sama dan kehadiran yang dibangun Tiongkok di Pasifik Selatan dalam beberapa dekade terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar, dan beberapa negara menjadi mitra kerja sama Tiongkok. Namun, berbagai aktivitas Tiongkok di beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan yang terlihat dalam belakangan ini memunculkan sejumlah dugaan dari aktor-aktor tradisional yang telah lama ada di kawasan, termasuk Australia. Hal ini mengingatkan sifat agresif Tiongkok masa lampau dan peningkatan kehadiran militernya di kepulauan pasifik berpotensi membawa ancaman bagi Australia. Penulis akan menggunakan pendekatan dari Stephen M. Walt untuk menganalisis mengapa kehadiran Tiongkok dapat mengancam pengaruh Australia di Negara-negara di Pasifik Selatan.

Kata kunci: *Kepulauan Pasifik, Australia, Tiongkok, Pengaruh, Kerja Sama, Diplomasi*

ABSTRACT

The South Pacific is an area consisting of archipelago countries with small territories. These countries are very vulnerable to foreign interventions due to their very strategic geographical conditions for conducting trade activities and for placing military bases during World War. While Australia itself is also the country in the region that has the largest area, population and military force in the South Pacific region to become one of the main actors in the region. But the cooperation and attendance built by China in the South Pacific in recent decades has had considerable improvement, and some countries become Chinese cooperation partners. However, various Chinese activities in some countries in the South Pacific region that have been seen in recent times brought about a number of alleged traditional actors in the region, including Australia. This given the aggressive nature of Chinese past and increased military presence in the Pacific islands potentially bringing threats to Australia the authors would use the approach from Stephen M. Walt to analyse why China's presence Can threaten the Australian influence in countries in the South Pacific.

Key words: *Pacific Islands, Australia, China, Influence, Cooperation, Diplomacy*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasifik Selatan adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritori yang kecil. Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, kawasan ini tetap menjadi perebutan bagi kekuatan-kekuatan besar, baik itu negara seperti Tiongkok maupun Australia yang merupakan bagian dari Pasifik Selatan sendiri, juga turut serta dalam usaha memperebutkan pengaruh di wilayah Pasifik Selatan.

Pasifik Selatan mayoritas dihuni oleh negara-negara kepulauan dengan negara seperti Fiji, Samoa, Vanuatu dan negara lain termasuk didalamnya. Sedangkan Australia sendiri juga negara di kawasan yang memiliki luas wilayah, populasi dan kekuatan militer terbesar di kawasan Pasifik Selatan sehingga menjadi salah satu aktor utama di kawasan tersebut. Setiap kejadian maupun kegiatan yang berlangsung di Pasifik Selatan di negara-negarakawasan Pasifik Selatan tidak lepas dari perhatian serta kebijakan luar negeri pemerintahan Australia , mengingat hal tersebut bisa berimbas bagi kepentingan keamanan nasional Australia(Shepard, 2009, p. 413).

Dalam hal lain, hubungan kerja sama dan kehadiran yang dibangun Tiongkok di Pasifik Selatan dalam beberapa dekade terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar, dan beberapa negara menjadi mitra kerja sama Tiongkok. Namun, berbagai aktivitas Tiongkok di beberapa negara di kawasan

Pasifik Selatan yang terlihat dalam belakangan ini memunculkan sejumlah dugaan dari aktor-aktor tradisional yang telah lama ada di kawasan, termasuk Australia. Hal ini mengingat sifat agresif Tiongkok masa lampau dan peningkatan kehadiran militernya di kepulauan pasifik berpotensi membawa ancaman bagi Australia (Wallis, 2012).

Awal mula Tiongkok meningkatkan perhatiannya ke Pasifik Selatan secara intensif adalah setelah Perang Dingin. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan bantuan ekonomi Tiongkok kepada negara-negara Pasifik Selatan yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. Tiongkok tercatat sebagai pendonor terbesar ketiga selain Amerika Serikat dan Australia yang memberikan paket bantuan yang bertujuan memperkuat kerja sama perdagangan, meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya alam (Shie, 2007, pp. 307-326). Dengan tawaran bantuan ekonomi berupa pinjaman lunak dan jangka panjang menjadikan Tiongkok sebagai “Banker baru” di kawasan Pasifik Selatan (Hanson, 2011, pp. 1-23).

Pada mulanya kehadiran Tiongkok mendapat persetujuan dari Australia sebagai bentuk upaya penyeimbang kehadiran Uni Soviet di regional Pasifik Selatan. Salah satu bentuk sikap keterbukaan Australia terhadap Tiongkok ditunjukkan di masa Perdana Menteri Gough Whitlam yang disebut “*The father of Australia-China Relations*” dalam menjalin hubungan diplomatik dengan rezim komunis Tiongkok (McDonnell, 2014). Menurut Yang, pertumbuhan pengaruh Tiongkok di kawasan berjalan beriringan dengan hubungan baik yang terus ditingkatkan oleh Tiongkok kepada kekuatan tradisional di Pasifik Selatan yaitu

Australia sehingga hal-hal seperti perebutan pengaruh seharusnya tidak akan terjadi (Yang, 2011).

Namun dalam perkembangannya saat ini pengaruh Tiongkok semakin menguat sehingga dianggap dapat menyaingi hegemoni Australia di kawasan Pasifik Selatan. Tiongkok mendapat sambutan yang baik karena kemurahan hatinya dalam memberikan bantuan lunak kepada negara-negara seperti Fiji, Kepulauan Solomon, Samoa, Vanuatu dan lainnya. Hal ini ditandai dengan Tiongkok yang menjadi destinasi kunjungan pertama pemimpin-pemimpin Negara Pasifik Selatan, menunjukkan pemimpin negara kecil ini menaruh lebih banyak harapan kepada Tiongkok dibanding Amerika Serikat (AS) dan sekutunya termasuk Australia (Reilly, 2003, pp. 94-104). Terdapat hal yang menjadi pertimbangan negara-negara tersebut mendekatkan diri ke Tiongkok, seperti pasca kejadian kudeta pada tahun 2006 di Fiji yang membuat Fiji melihat Tiongkok sebagai sosok yang lebih baik dibanding Australia¹.

Dalam hal mitra kerja sama perdagangan, Tiongkok menjadi pembeli dari berbagai hasil mineral yang terdapat di Fiji, sedangkan di tahun 2017 impor Fiji dari Tiongkok mencapai hingga 385 juta USD, hampir mendekati Australia diangka 402 juta USD (OEC Fiji, 2017). Tiongkok juga diterima sebagai peninjau dalam *Pacific Island Forum* (PIF) dan pengamat dalam *Melanesia Spearhead Group* (MSG), dua forum internasional yang anggota-anggotanya adalah negara di Pasifik Selatan.

Beberapa masalah kemudian muncul di antaranya ketika Fiji yang tergabung dalam PIF dituntut oleh Australia agar dapat menerapkan sistem pemerintahan

¹Tidak seperti Australia yang menuntut demokrasi berjalan di Fiji, Tiongkok memberikan bantuan tanpa mencampuri urusan dalam negeri Fiji.

yang demokratis seperti yang diterapkan oleh negara-negara kepulauan Pasifik Selatan lainnya, mengingat hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam keanggotaan PIF (Brown, 2012, p. 66). Hal ini terkait dengan berbagai kudeta yang terjadi dalam domestik Fiji, salah satunya ketika kudeta pada tahun 2006 di Fiji yang mengubah sistem pemerintahan Fiji dikuasai rezim militer. Australia yang memiliki pengaruh paling terbesar di kawasan dan juga di PIF mendesak diadakannya pemilu demokratis, atau Fiji akan dibekukan keanggotaannya dari PIF. Hal tersebut dapat menyebabkan Fiji tidak bisa lagi menerima bantuan luar negeri dari pendonor utamanya (Gaglioti, 2009). Namun kondisi perpolitikan domestik yang kurang stabil membuat pemilu sulit untuk dijalankan, seperti faktor kesenjangan antara etnis pribumi dan pendatang india sehingga kudeta dianggap menjadi salah satu jalan untuk mengatasi masalah kesenjangan etnis tersebut (Thomas, pp. 131-146).

Australia sebagai kekuatan hegemoni terbesar di wilayah Pasifik Selatan tidak hanya sekali mencampuri kegiatan domestik di Fiji, Australia sebelumnya juga pernah mengirimkan ribuan tentara di negara-negara Pasifik Selatan termasuk Fiji untuk mengatasi kudeta domestik Fiji yang dianggap dapat membahayakan Australia (Firth, 2005, p. 170). Kebijakan luar negeri lain yang diambil Australia menyangkut Fiji antara lain pernah mengakhiri sebagian besar proyek bantuan seperti beasiswa, pelatihan skill, dan pengurangan bantuan sebesar 30% ke Fiji. Dalam tingkatan regional Australia mengajak negara-negara lain di Pasifik Selatan untuk mengutuk kudeta Fiji dan memberikan tekanan yang besar agar tujuan Australia yaitu pemerintahan demokrasi yang konstitusional di Fiji berhasil tercapai (Firth, 2005, p. 211).

Australia juga menunjukkan kekuatan yang dimilikinya ketika membantu Kepulauan Solomon dalam mengatasi konflik etnis yang terjadi di negara tersebut. Meski awalnya menolak, namun akibat konflik yang tidak berkesudahan menyebabkan Australia akhirnya membentuk RAMSI (*Regional Assistance Mission to Solomon Island*) dan mengintervensi konflik di Kepulauan Solomon. Selain itu, Australia juga seringkali mengurangi bahkan menghentikan bantuan-bantuan ekonomi jika negara-negara di Pasifik Selatan tidak menjalankan demokrasi dengan baik dalam pemerintahan, seperti halnya terjadi di Fiji. Hal ini menunjukkan bagaimana Australia adalah hegemoni yang dapat mencampuri berbagai urusan dalam negeri negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Kondisi ini juga akhirnya oleh beberapa seperti Kepulauan Solomon, Fiji dan negara-negara lain di kawasan menganggap bahwa Tiongkok lebih mudah dalam memberikan bantuan ekonomi dan pinjaman lunak dibanding Australia yang seringkali mencampuri perpolitikan internal negara lain.

Berdasarkan pada uraian di atas, riset ini akan menganalisis bagaimana Australia menganggap kehadiran dan pengaruh Tiongkok di negara-negara kawasan di Pasifik Selatan menjadi ancaman terhadap dominasi dan hegemoni yang selama ini telah dibangun Australia. Mengingat kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan awalnya sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh Uni Soviet di kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kehadiran Tiongkok dapat mengancam pengaruh Australia di Negara-negara di Pasifik Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perspektif Australia yang menganggap Tiongkok sebagai ancaman di Pasifik Selatan.
2. Untuk mengetahui proses kedatangan Tiongkok ke beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan dan hubungan kerja sama yang terjalin didalamnya.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor terkait Tiongkok yang mengurangi kekuatan hegemoni Australia di kawasan Pasifik Selatan.
4. Untuk mengetahui sikap Australia atas kehadiran Tiongkok yang mengancam dominasi pengaruh Australia di kawasan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, riset ini mencoba menganalisis kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan dapat mengancam Australia sebagai kekuatan hegemoni terbesar yang telah ada. Riset ini menggunakan *aggregate power*, *proximity*, *offensive capability* dan *offensive intentions* yang menjadi indikator dalam menganalisis rumusan masalah. Banyak peneliti yang telah meneliti tentang apa saja penyebab kehadiran Tiongkok di negara-negara kawasan Pasifik Selatan seperti Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan lainnya sekaligus melihat bagaimana respon negara-negara tersebut dalam menanggapi. Namun, riset ini akan melihat bagaimana ke-empat indikator tadi dapat mengukur tingkat ancaman yang diberikan Tiongkok atas kehadirannya di kawasan Pasifik Selatan terhadap

Australia. Riset ini layak untuk diteliti dalam mempelajari fenomena terkait studi keamanan dalam hubungan internasional.

1.5 Cakupan Penelitian

Cakupan dalam penelitian ini adalah kajian politik luar negeri Australia, khususnya rivalitas pengaruh Australia dan Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan dari sudut pandang Australia. Kawasan Pasifik Selatan sendiri dihuni oleh negara Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Kepulauan Cook, Nauru, Palau, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Riset dilakukan pada negara Fiji, Kepulauan Cook, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Vanuatu di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki hubungan kerja sama baik dengan Tiongkok dan Australia. Sedangkan belum ditemukan data terkait pada negara Kiribati, Nauru, Palau dan Tuvalu sehingga berdasarkan acuan kondisi geografis, stabilitas negara, gap ekonomi dan pembangunan infrastruktur antarnegara yang tidak jauh berbeda di kawasan Pasifik Selatan, ketujuh negara pada riset dapat menggambarkan kondisi kawasan secara keseluruhan.

Rivalitas ini dimulai ketika awal kedatangan Tiongkok pada beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan dari tahun 1980, hingga perkembangan kerja sama dan kebijakan luar negeri Tiongkok dan Australia terhadap negara-negara tersebut hingga tahun 2018 mengingat terdapat beberapa studi kasus yang penting untuk dimasukkan di dalam penelitian.

1.6 Tinjauan Pustaka

Beberapa artikel jurnal dan buku yang membahas terkait hubungan kerja sama yang terjalin antara Tiongkok-Fiji dan Australia-Fiji. Salah satunya adalah tulisan Tamara Renee Shie yang membahas terkait kebangkitan pengaruh

Tiongkok dengan berbagai tawaran bantuan melalui kerja sama perdagangan, infrastruktur, pengembangan SDA kepada Fiji (Shie, 2007, p. 309). Tiongkok melihat adanya celah yang ditimbulkan dari pengurangan bantuan/subsidi kepada Fiji oleh donor tradisional yaitu Australia dan Amerika Serikat di Kepulauan Pasifik, lalu mengambil kesempatan tersebut untuk lebih dekat dengan Fiji. Fokus penulis dalam tulisan ini yaitu upaya-upaya Tiongkok dalam meningkatkan pengaruh di Fiji.

Terkait kehadiran Tiongkok di hampir keseluruhan negara-negara yang terdapat di Pasifik Selatan, Denghua Zhang dalam penelitiannya menjelaskan terkait fenomena tersebut. Zhang berupaya menganalisis kepentingan Tiongkok di wilayah Pasifik, dan menemukan tiga pola untuk melakukan pendekatan kepada negara-negara tersebut di antaranya berupa kunjungan diplomasi, penguatan pengaruh melalui bantuan ekonomi dan kebijakan non-intervensi (Zhang, 2015, pp. 52-53). Penelitian ini berpendapat bahwa dengan pertumbuhan kekuatan ekonomi dan sektor strategis lain Tiongkok berjalan lurus dengan upaya Tiongkok dalam menjangkau global. Penjangkauan ini pasti lambat laun akan mencapai wilayah Pasifik dan mungkin mendapatkan peran yang lebih penting dalam memperluas strategi militer Tiongkok meski tidak dalam jangka waktu yang dekat.

Sehubungan dengan tulisan Zhang, Shahar Hameiri dalam risetnya mengklaim ada dua hal yang dapat dilihat dalam hubungan yang terjadi di antara Tiongkok-Pasifik Selatan-Australia ini. Pertama, terjadinya peningkatan bantuan ekonomi, perdagangan dan investasi ke wilayah kepulauan Pasifik tidak pada titik untuk dominasi regional namun lebih kecil kepada untuk mengamankan pasokan

sumber daya alam. Berdasarkan klaim pertama, klaim kedua Hameiri adalah kebangkitan Tiongkok juga tidak terlalu memiliki hubungan dengan program-program bantuan yang ditawarkan. Namun, pandangan yang terbangun saat ini di kawasan Pasifik Selatan lebih kepada upaya yang dibangun oleh para pemimpin-pemimpin di Pasifik untuk meningkatkan posisi tawar menawar dengan Australia dan membuat Australia bersikap lebih lunak (Hameiri, 2015, pp. 18-19).

Tulisan lain adalah milik Henderson & Reilly, yang menjelaskan kondisi ketika pemimpin negara-negara di Kepulauan Pasifik melakukan kunjungan ke Tiongkok dan mendapat sambutan hangat. Henderson & Reilly menjelaskan bagaimana kunjungan tersebut adalah bukti keberhasilan *Aid Diplomacy* Tiongkok untuk negara seperti Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan beberapa negara lainnya. Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak yang diberikan pada saat yang tepat oleh Tiongkok guna membangun hubungan baik ditengah stagnannya hubungan Australia dan negara-negara di kawasan Pasifik tersebut (Reilly, 2003, p. 102).

Peter Brown menekankan fokus Australia dalam *Pacific Island Forum* atau PIF menjadi 4 hal yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang baik, keamanan dan pembangunan berkelanjutan. Keempat hal ini diterapkan demi tercapainya stabilitas dan negara-negara di Kepulauan Pasifik menjadi dewasa dan demokratis (Brown, 2012, p. 69). Brown menjelaskan kekuatan pengaruh Australia yang dapat mengintervensi Fiji untuk mengadakan pemilu paska kudeta tahun 2006, namun kemudian menimbulkan penolakan Fiji dan akhirnya sanksi dijatuhkan terhadap Fiji, serta konflik hubungan seperti ini yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk melebarkan pengaruhnya.

Peter J. Connolly dalam risetnya menyatakan bahwa teori *'peaceful rise'* sudah tidak lagi sesuai dalam menggambarkan situasi dan dampak yang dapat diberikan oleh Tiongkok secara global. Hal ini berdasarkan pada kekuatan ekonomi, kapabilitas militer dan pengaruh regionalnya telah lama melewati batas untuk tetap menjadi negara dengan profil rendah. Perubahan perilaku Tiongkok ini didasarkan pada beberapa hal seperti sebagai upaya perlindungan warga negara Tiongkok di luar negeri dan kepentingan ekonomi sehingga gesekan dengan aktor-aktor lain dapat terjadi. Connolly juga mencontohkan hal tersebut melalui Papua New Guinea yang memiliki potensi yang menarik bagi Australia dan Tiongkok, sehingga terjadi persaingan pengaruh antara kedua negara di PNG (Connolly, 2016, p. 17). Hal yang sama juga berlaku bagi Australia dan Tiongkok dalam melihat negara-negara di Pasifik Selatan.

Sementara itu Stewart Firth, menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan luar negeri Australia yang diambil selama ini sejalan dengan kepentingan untuk melindungi negara dan menjaga stabilitas kawasan. Keputusan-keputusan seperti dalam pengiriman militer ketika terjadi kudeta dan pemberian sanksi pemotongan bantuan adalah tidak lebih dari upaya Australia mengawasi perkembangan politik dan menjalankan demokrasi agar tercipta kestabilan (Firth, 2005, p. 208). Firth berfokus pada kebijakan luar negeri Australia dan menekankan besarnya pengaruh Australia kepada Fiji dengan maksud untuk menunjukkan Australia peduli dalam menjaga kestabilan kawasan regional yang selama ini telah dijaga.

Vinsensio Dugis, mengemukakan argumen terkait dengan kehadiran Tiongkok dan hubungannya dengan pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan (Dugis, 2015, pp. 4-17). Dugis menyebutkan akan adanya faktor-faktor

yang dapat mendukung atau malah menghambat Tiongkok dalam menyebarkan pengaruhnya, apakah hal tersebut menjadi misi utama Tiongkok atau hanya sebuah perasaan takut tidak berdasar yang dirasakan oleh Australia terhadap perkembangan Tiongkok yang pesat.

Literatur-literatur di atas membahas tentang awal kedatangan Tiongkok di di kawasan Pasifik Selatan, dominasi pengaruh Australia sebagai pendonor tradisional di kawasan dan sikap pemerintah masing-masing negara kawasan Pasifik Selatan terhadap berbagai bantuan yang ditawarkan oleh kedua negara. Literatur-literatur di atas memperlihatkan adanya kepentingan dan konflik pengaruh antar aktor negara yang terlibat yaitu Australia-Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan, namun kurangnya pendalaman lebih lanjut untuk membahas kemungkinan adanya rivalitas yang dapat ditimbulkan akibat hegemoni Australia yang terancam dominasinya oleh Tiongkok membuat hal ini penulis rasa layak untuk dilakukan penelitian.

1.7 Landasan Konsep

Stephen M. Walt (1985, pp. 3-43), menjelaskan terkait bagaimana sebuah negara mengambil sikap ketika berhadapan dengan negara lain yang memiliki kekuatan yang setara atau lebih kuat. Di perlukan strategi yang sesuai dalam menyikapi ancaman untuk dapat menjaga keamanan negara, seperti halnya *balancing* dan *bandwagoning*.

Terhadap ancaman kekuatan yang melebihi dan menimbulkan ancaman terhadap suatu negara kecil yang lebih lemah, maka negara kecil itu dapat patuh dan ikut pada kekuatan ancaman tersebut (*bandwagoning*), sedangkan untuk negara yang memiliki kekuatan berimbang dengan ancaman maka dapat

mengupayakan penyeimbangan pengaruh dan kekuatan (*balancing*). Walt berpendapat bahwa sikap *balancing* itu tidak harus dengan meningkatkan kapabilitas militer (internal negara) sehingga berpotensi terjadi benturan perang fisik, namun negara dapat menjadi oposisi dari sumber ancaman dalam menyeimbangkan pengaruh dari sumber ancaman tersebut yang berusaha merusak hegemoni yang sudah ada.

Walt menyatakan alasan utama bagi negara untuk melakukan *balancing*, yaitu agar sumber ancaman/hegemon baru tidak menjadi semakin kuat karena penyebaran pengaruhnya dibiarkan saja. Pasalnya, jika negara tidak melakukan *balancing* maka negara tersebut beresiko gagal menahan laju dari hegemoni lain yang berpotensi mengancam keamanan negara kedepannya (Walt, 1985, p. 5).

Walt menjabarkan empat faktor yang menjadi pertimbangan suatu negara dalam mengukur tingkat ancaman (*the level of threat*), yaitu:

1. *Aggregate power*, semakin besar total sumber daya dari negara ancaman (populasi, kecakapan militer, dana pertahanan, dll) maka semakin besar potensi ancaman yang ditimbulkannya kepada negara lain.
2. *Proximity*, posisi dan kekuatan ancaman terdekat yang berhubungan dengan negara ancaman utama yang dapat menunjukkan pergerakan potensial apabila diperhatikan secara baik oleh negara yang terancam.
3. *Offensive capability/Offensive power*, negara dengan kemampuan militer yang besar/setara/mendekati dianggap paling berpotensi menjadi ancaman bagi hegemoni negara lainnya.

4. *Offensive intentions*, negara sumber ancaman yang terlihat bertindak agresif dalam penyebaran pengaruh, cenderung memprovokasi yang lain dengan berbagai kebijakan-kebijakan agresif sehingga seringkali menimbulkan gesekan kepentingan.

Walt mengemukakan bahwa hal-hal di atas yang kemudian menjadi patokan negara mengambil sikap dan kebijakan dalam menghadapi negara-negara lain yang dianggap menjadi ancaman dari hegemon yang ada dalam persaingan penyebaran pengaruh. Walt menggunakan studi kasus dua negara superpower era perang dingin yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Dengan berlandaskan pada hal di atas, pada makalah ini penulis akan mencoba mengaplikasikan dalam konteks hubungan yang terbangun diantara Australia dan Tiongkok sebagai negara dominan yang saling bersaing pengaruh di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Dengan mengaplikasikan empat faktor yaitu *aggregate power*, *proximity*, *offensive capability* dan *offensive intentions* dalam menilai Tiongkok. Sehingga dapat mengukur tingkat ancaman yang diberikan oleh Tiongkok terhadap Australia di kawasan Pasifik Selatan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis analisis penelitian kualitatif dan deskriptif yaitu studi pustaka terhadap objek/subyek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan topik yang akan ditinjau yakni bagaimana Australia melihat kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik

Selatan semakin lama semakin mengancam pengaruh dominasi yang telah Australia bangun selama ini.

Rumusan masalah ini nantinya akan dianalisis dan dijelaskan dengan konsep yang digagas oleh Stephen M. Walt terkait *Alliance Formation and the Balance of World Power*, mengenai kehadiran Tiongkok dan hubungan kerja sama yang dijalin dengan beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan, dapat mengancam dominasi Australia di kawasan Pasifik Selatan. Penelitian kualitatif sendiri memiliki artian penelitian ilmiah yang melihat dan memahami suatu fenomena konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris, 2010, p. 9).

Dalam interaksi yang dijelaskan, menemukan jawaban dari hasil penelitian juga dapat menggunakan literatur yang menyangkut penelitian tersebut. Pengambilan data ini bisa berupa dokumen, jurnal ilmiah, buku terkait teori dan pandangan, serta website resmi mengenai penjelasan kebijakan yang berlaku di tiap-tiap negara yang menjalankan atau terlibat dalam fenomena tersebut.

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah negara Tiongkok dan Australia sedangkan sikap dan hubungan kerja sama yang dibangun terhadap negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai objek. Untuk membantu menganalisis fenomena dalam menjawab rumusan masalah, penulis menerapkan metode dari Stephen M. Walt dalam menjelaskan

terkait Australia yang merasa terancam hegemoninya di kawasan akibat tindakan-tindakan dan pengaruh Tiongkok.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan mengambil dokumen atau literatur resmi yang terpercaya dan mengkritisnya dengan perubahan-perubahan yang ada. Sebagian besar buku-buku yang diambil adalah buku-buku rujukan terhadap Proses penelitian terkait kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Australia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, serta pengaruh yang muncul didalam kedua kerja sama tersebut yang bisa saling mempengaruhi antar subjek satu sama lain.

1.8.3 Proses Penelitian

Proses penelitian menyangkut perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian yang mana hal tersebut dijadikan sebagai panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa tahap yang akan dilakukan adalah:

1. Pra Riset mencakup kegiatan untuk persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.
2. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang bersumber dari tulisan-tulisan akademik seperti jurnal, buku-buku pendukung, laman resmi, dan juga berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya didasarkan pada reputasi kredibilitas media/penerbit dan hubungannya dengan topik penelitian.

3. Melakukan analisis dari data yang sudah diperoleh dan hasil pemikiran dari temuan dan deskripsi yang terkait untuk menjawab rumusan masalah dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.



BAB II

ANALISIS TINGKAT ANCAMAN TIONGKOK BAGI AUSTRALIA: AGGREGATE POWER & PROXIMITY

Berlandaskan pendahuluan pada bab sebelumnya, bab ini akan berupaya menjabarkan faktor-faktor terkait patokan Australia dalam melihat Tiongkok sebagai ancaman di kawasan berdasarkan pada pandangan M. Walt di landasan teori. Pertama-tama riset ini akan mengkaji terkait *Aggregate power* dan *Proximity* kedua negara yang kemudian digunakan untuk menilai apakah Tiongkok menjadi sumber ancaman bagi Australia di kawasan Pasifik Selatan.

2.1 *Aggregate Power*

Asumsi dari para realis dalam melihat negara berjuang untuk mencapai *power* adalah dengan meningkatkan hal-hal terkait ketahanan internal dan kapabilitas militer. Peralnya, jika sebuah negara gagal dalam membendung kekuatan hegemon lain yang menjadi potensial ancaman maka hal tersebut akan membahayakan negara dalam mencapai tujuan kedepan.

Aggregate power sendiri adalah penilaian terhadap kekuatan dari ancaman berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh negara ancaman tersebut. Dalam hal ini Australia melihat semakin besar sumber daya-sumber daya terkait yang dimiliki Tiongkok, maka akan semakin besar potensi ancaman yang ditimbulkan bagi negara Australia. Sumber daya ini di antaranya terkait populasi, kapabilitas militer serta alokasi dana pertahanan (Walt, 1985, p. 9).

Aggregate Power...-The greater a state's total resources (i.e., population, industrial and military capability, etc.), the greater a potential threat it can pose to others (Walt, 1985, p. 9).

Aggregate power atau kekuatan agregat secara umum dapat di dasari dari kekuatan populasi dan kapabilitas militer serta dana pertahanan. Kekuatan tersebut menjadi indikator dalam memperhitungkan kekuatan agregat. Hal ini karena semakin besar kekuatan suatu negara, maka akan semakin besar pula ancaman yang dapat diberikan oleh negara tersebut terhadap negara lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih lemah atau rendah. Kekuatan agregat yang besar berbanding lurus dengan kekuatan untuk melakukan ancaman dan serangan.

Pertama, dalam hal melihat populasi yang dimiliki oleh Tiongkok dengan Australia. Dari segi populasi, dapat diperhatikan pada gambar populasi penduduk negara-negara dunia di bawah ini:

Tabel 2. 1 Posisi Populasi penduduk Tiongkok-Australia di dunia

Data Terkait Populasi	Tiongkok	Australia
Populasi tahun 2018 (Jiwa)	1.427.647.786	24.898.152
Area (Km ²)	9.706.961	7.692.024
Kepadatan Area	148/ Km ²	3/ Km ²
Tingkat pertumbuhan (Pertahun)	0,43%	1,23%
Peringkat di dunia	Ke-1	Ke-55

Sumber : (2019 World Population).

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa populasi dari Tiongkok berjumlah sekitar 1,4 Milyar jiwa penduduk dan menduduki posisi pertama negara dengan populasi terbanyak di dunia. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Australia sendiri yang berada di posisi ke-55 dengan jumlah penduduk sebesar 24,8 juta jiwa penduduk. Meski pertumbuhan penduduk Australia lebih besar

dibanding Tiongkok yaitu 1,23% berbanding 0,43% namun berada di kuantitas yang jauh berbeda sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan.

Kepemilikan terhadap jumlah penduduk yang besar oleh Tiongkok kemudian berhasil dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi dengan SDM yang melakukan pengembangan industri sehingga berhasil bersaing dengan industri-industri internasional dari negara lainnya termasuk Amerika Serikat dan Australia. Perkembangan industri menghasilkan keuntungan yang besar dan kemudian dialokasikan untuk pembangunan Tiongkok sehingga dapat mencapai kekuatan saat ini, sebuah masa di mana Tiongkok disebut *Rising of the Dragon*.

Perkembangan industri yang pesat memberikan keuntungan dan peningkatan dalam GDP. Pertumbuhan GDP yang dicapai Tiongkok sepanjang tahun 2013-2018 rata-rata adalah 6,46%. Sedangkan pertumbuhan GDP yang dicapai oleh Australia sepanjang tahun 2013-2018 adalah 0,98% (WorldBank, 2019). Tiongkok sedang berada di pertumbuhan GDP yang stabil di atas 5% dan ini membantu menaikkan pamor Tiongkok sebagai negara yang mengalami kemajuan dalam ekonomi dibandingkan Australia di beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan.

Selanjutnya, populasi juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya manusia di bidang militer bagi kedua negara, dalam hal ini ketersediaan pasukan tempur. Dengan menempati populasi terbesar di dunia, Tiongkok juga memiliki pasukan tempur dengan jumlah yang besar dan ini berarti potensi yang besar dalam memenangkan konflik maupun perang. Ketersediaan pasukan tempur kedua negara dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2 Angka Pasukan Militer Tiongkok-Australia

Pasukan Militer	Tiongkok	Australia
SDM yang tersedia	755,855,402	10,808,002
Siap Melayani Negara	621,105,706	8,888,501
Mencapai Usia Militer	19,614,518	282,654
Total Personil Militer	2,693,000 (est.)	79,700 (est.)
Personil Aktif	2,183,000	60,000
Personil Cadangan	510,000	19,700

Dalam hal industri dan kapabilitas militer berdasarkan riset dari *GFP-global listing* (Global Fire Power), Tiongkok berada di posisi ke-3 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia berdasarkan PwrIndx rating 0.00673 (0.000 *being perfect*). Sedangkan Australia berada di posisi ke-19 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia berdasarkan PwrIndx rating 0.3277 (0.000 *being perfect*). Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup jauh *head to head* antara kekuatan militer Tiongkok dengan Australia (GFP).

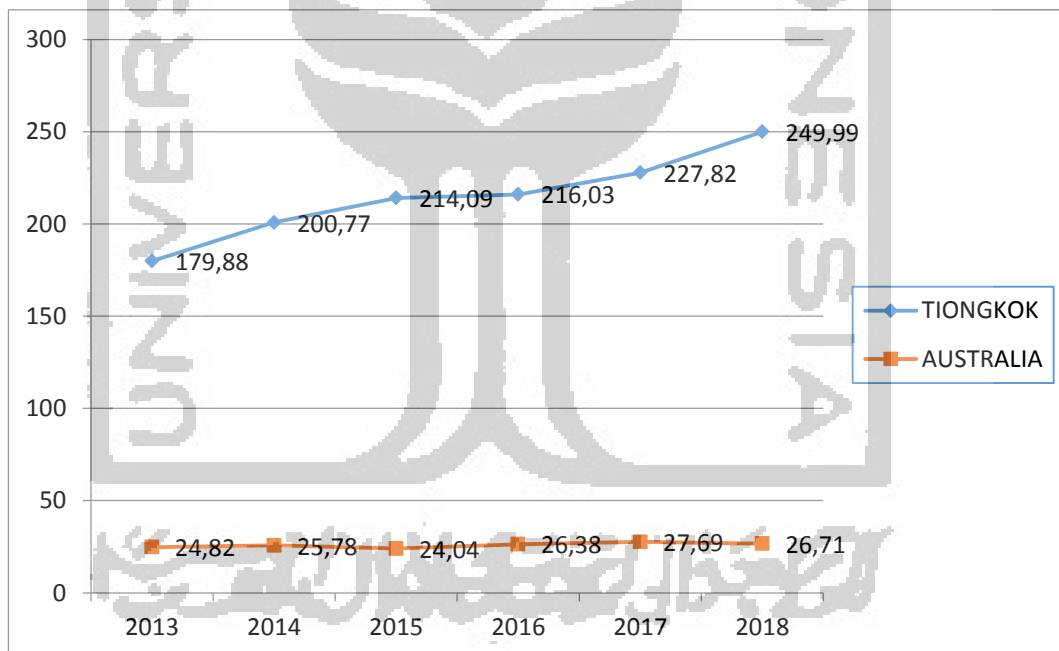
Selanjutnya dalam hal alokasi dana pertahanan negara yang tepat dan kondusif dapat memberikan kemajuan yang stabil terhadap pertahanan dan militer. Hal ini terkait dengan tujuan negara untuk pembangunan dan ekonomi nasional jangka panjang yang stabil, hingga kesiapan merespon berbagai perubahan kompleks dalam lingkungan politik dalam dan luar negeri membutuhkan tentara modern yang kuat (Wang, 2019, p. 188).

Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan dalam alokasi dana pertahanan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah, dari tahun 2013 alokasi dana pertahanan Tiongkok sebesar 179,88 juta USD dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai sekitar 250 juta USD. Sedangkan alokasi

dana pertahanan Australia berkisar 24,8 juta USD pada tahun 2010 dan meningkat sedikit pada tahun 2018 menjadi 26,7 juta USD (SIPRI, 2019).

Tabel 2. 3 Dana pertahanan Tiongkok dan Australia periode 2013-2018

Alokasi Dana Pertahanan (Tahun)	Tiongkok (Juta USD)	Australia (Juta USD)
2013	179,88	24,82
2014	200,77	25,78
2015	214,09	24,04
2016	216,03	26,38
2017	227,82	27,69
2018	249,99	26,71



Gambar 2. 1 Grafik Tren alokasi dana pertahanan Tiongkok dan Australia periode 2013-2018

Dari data Gambar 2.1, dapat dilihat peningkatan signifikan dalam alokasi dana pertahanan Tiongkok sejak tahun 2013-2018. Hal ini berbanding terbalik dengan Australia yang sepanjang 2013-2018 hanya stagnan di kisaran 24-27 juta

USD. Alokasi dana yang besar dalam militer dan teknologi berimbas pada kenaikan kekuatan Tiongkok dalam hal kemiliteran.

Berbagai perbandingan antara Australia dan Tiongkok di atas terkait dengan populasi, SDM, Pertumbuhan GDP serta alokasi dana pertahanan memperlihatkan bahwa *aggregate power* Tiongkok lebih superior dibandingkan Australia. *Aggregate power* Tiongkok yang besar sejalan dengan potensi ancaman yang dapat diberikan kepada Australia dalam bersaing pengaruh di kawasan Pasifik Selatan.

2.2 *Proximity*

Faktor kedua yaitu *proximity* atau kedekatan posisi geografis, juga menjelaskan bahwa ancaman dari suatu negara terhadap negara lain dapat dilihat dari kedekatan geografis. Dalam hal ini ancaman dilihat dari posisi dan kekuatan ancaman terdekat yang berhubungan dengan negara ancaman utama yang dapat menunjukkan pergerakan potensial apabila diperhatikan secara baik oleh negara yang terancam. Semakin dekat jarak antar sebuah negara maka semakin besar pula potensi ancaman yang dapat diberikan oleh negara tersebut terhadap negara lain (Walt, 1985, pp. 10-11).

Proximate Power...- States will also align in response to threats from proximate power. Because the ability to project power declines with distance, states that are nearby pose a greater threat than those that are far away (Walt, 1985, p. 10).

Waltz juga menjelaskan *proximity* dengan menggunakan contoh kasus ketika perang dingin antara Uni Soviet-Amerika Serikat. Uni Soviet digambarkan sebagai posisi yang lebih lemah dibandingkan Amerika dalam hal persebaran pivot atau poros kekuatan, karena Uni Soviet yang dianggap sebagai kekuatan terbesar di Eurasia dianggap memberikan ancaman yang besar bagi negara-negara

yang berbatasan dengannya. Negara-negara di perbatasan ini umumnya bersifat imperial atau hanya dikendalikan oleh Uni Soviet sebatas *de facto*, lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan Amerika sehingga semakin meningkatkan ancaman bagi Uni Soviet (Walt, 1985, p. 36). Dalam hal ini, meskipun jarak antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat secara geografis jauh, namun Amerika tetap dapat memberikan ancaman kepada Uni Soviet dengan mempengaruhi negara-negara yang berbatasan secara langsung dengan Uni Soviet tersebut untuk melemahkan kekuatan Uni Soviet.

Dari segi *proximity* yang berpeluang menjadi ancaman bagi Australia adalah kedekatan hubungan yang dibangun oleh Tiongkok terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan berpotensi menjadi seperti kedekatan Tiongkok-Asia Tenggara termasuk yang terdekat yaitu Indonesia, yang notabene tergabung dalam ASEAN.

Dalam lingkup bilateral Tiongkok menjalin kerja sama dengan Indonesia, Malaysia, Kamboja, Laos, Filipina dan lainnya. Baik dari segi *ASEAN Regional Forum*, *China-ASEAN Free Trade Area*, *ASEAN+3*, hingga kerja sama lingkup bilateral yang telah dibangun oleh Tiongkok ini menunjukkan besarnya peningkatan *'soft power'* Tiongkok di Asia Tenggara. Tiongkok tidak lagi dipandang sebagai sebuah ancaman namun dipandang sebagai mitra kerja sama yang memberikan peluang untuk memperkuat kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Poros atau *Pivot* yang terbentuk dari hubungan kerja sama intens yang dibangun oleh Tiongkok di wilayah Asia Tenggara menjadikan hal ini menjadi sebuah ancaman bagi Australia karena negara-negara ini berada langsung di

selatan dari Australia. Tindakan Australia yang menunjukkan sikap kecemasan akan kemungkinan ancaman yang dapat diberikan oleh tetangganya di Asia Tenggara dapat dilihat pada masa John Howard. John Howard merupakan Perdana Menteri Australia yang pada tahun 2004 mengeluarkan kebijakan zona 1000 mil yang disebut *AMIZ (Australian Maritime Identification Zone)*, yang mengharuskan pendeteksian dini dan penggalian informasi bagi siapapun yang memasuki 1000 mil dari lepas pantai Australia (Country Profile: Australia, 2005, p. 6). Kebijakan ini diambil Howard untuk menjamin keamanan masyarakat Australia dari adanya ancaman-ancaman yang dapat diberikan oleh pendatang yang berasal dari luar wilayah Australia terutama pendatang dari utara Australia, namun kebijakan ini mendapat pertentangan dari Indonesia karena dianggap melanggar kedaulatan.

Kebijakan lain yang diambil oleh pemerintahan Australia dan kemudian mendapat pertentangan dari Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara adalah penandatanganan nota kesepahaman dalam hal pertahanan misil pada Juli 2004 dengan program kerja sama pengembangan *Standard Missile 3* atau SM-3. SM-3 ini merupakan program kerja sama Australia-Amerika Serikat untuk memerangi terorisme dengan cara meningkatkan persenjataan misil, namun kritikan diberikan oleh Tiongkok-Asia Tenggara karena ditakutkan akan memicu perlombaan senjata dan memperbesar peluang terjadinya perang (Alami, et al., 2016, pp. 105-108).

Salah satu negara terdekat Australia yang berada di wilayah Asia Tenggara dan memiliki hubungan cukup baik dengan Tiongkok adalah Indonesia. Di era Presiden Joko Widodo, Tiongkok terlibat aktif dalam proyek infrastruktur di Indonesia yang meliputi pembangunan pelabuhan, pelabuhan udara, pembangunan

jalan, rel kereta api hingga *powerplan* berkapasitas 35 ribu megawatt (Humas Setkab, 2015). Hubungan baik yang dibangun oleh Tiongkok dengan Indonesia berjalan cukup lancar dan kedua negara kerap menjadi mitra kerja sama dalam berbagai bidang, sedangkan hubungan yang dibangun oleh Australia dengan Indonesia seringkali mengalami kondisi naik-turun. Peristiwa-peristiwa seperti bom Bali, penyadapan terhadap eksekutif pemerintah Indonesia oleh Australia, kebijakan AMIZ hingga kebijakan *Turn back the boat* yang berkaitan dengan imigran yang ditolak Australia kemudian dikirim ke perairan Indonesia menunjukkan konflik yang seringkali terlibat di antara kedua negara.

Hal ini dapat dilihat sebagai sikap tegas pada pemerintahan Australia yang ingin mengamankan wilayahnya dari masuknya hal-hal yang buruk yang berpotensi mengancam stabilitas Negara, dan kegiatan spionase dilakukan untuk menjamin tingkat keamanan yang lebih baik. Dilihat dari sisi realis, kedekatan hubungan yang dibangun oleh Tiongkok terhadap Indonesia dan negara lain di wilayah Asia Tenggara berpotensi menjadi poros pengaruh kekuatan Tiongkok yang bisa mengancam Australia secara langsung. Karena negara seperti Indonesia secara tradisional sulit dihadapi, sangat dekat dan berpotensi mengancam Australia (Walsh, 2018).

Poros kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang berhasil dibangun di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia yang berada di utara Australia, memberikan tekanan kepada pemerintah Australia terkait keamanan wilayah dan secara tidak langsung meningkatkan pamor Tiongkok di mata para pemimpin negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan. Dengan kata lain, potensi ancaman bagi Australia berdasarkan *proximity* yang awalnya hanya bersumber dari hubungan

Tiongkok-Indonesia bisa bertambah berdasarkan hubungan yang dibangun oleh Tiongkok-Kepulauan Pasifik Selatan. Hal ini karena Tiongkok juga berhasil dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan dan menjadikan negara-negara seperti Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Samoa dan lainnya sebagai poros baru mitra kerja sama Tiongkok, maka negara-negara kecil ini yang memiliki jarak geografis yang lebih dekat dengan Australia sehingga semakin meningkatkan ancaman bagi keamanan Australia sebagai perwakilan Amerika Serikat di Pasifik Selatan.



BAB III

ANALISIS TINGKAT ANCAMAN TIONGKOK BAGI AUSTRALIA:

OFFENSIVE CAPABILITY & OFFENSIVE INTENTION

Setelah menganalisis mengenai tingkat ancaman Tiongkok bagi Australia melalui faktor *Aggregate Power* dan *proximity* di bab sebelumnya, bab ini akan membahas faktor selanjutnya mengenai analisis tingkat ancaman Tiongkok bagi Australia berdasarkan *offensive capability* dan *offensive intention*. Kedua faktor ini menjadi penting untuk dibahas mengingat Tiongkok sebagai pengancam hegemoni Australia di kawasan memiliki kemampuan atas 2 hal tersebut. Hal ini tidak lepas dari dukungan pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia serta pengaruh politik yang telah Tiongkok capai hingga saat ini.

3.1 *Offensive Capability*

Offensive capability atau disebut juga *Offensive power*, yaitu negara dengan kemampuan militer yang besar/setara/mendekati dianggap paling berpotensi menjadi ancaman bagi hegemoni negara lainnya.

Offensive power. ...All else being equal, states with large offensive capabilities are more likely to provoke an alliance than those who are either military weak or capable only of defending (Walt, 1985, p. 11).

Kemampuan untuk menyerang adalah ketika di mana sebuah negara dengan kemampuan yang besar untuk melakukan serangan, dengan ditunjang oleh kemampuan militer sehingga membuat negara lain merasa terancam. Dalam hal ini, Tiongkok sebagai sebuah negara memiliki kemampuan atas hal tersebut berdasarkan kepemilikan atas kekuatan militer yang besar.

Di bawah adalah tabel kekuatan persenjataan militer di antara kedua negara.

Tabel 3. 1 Persenjataan Militer Tiongkok – Australia

Perbandingan Persenjataan Militer		Tiongkok	Australia
Persenjataan Darat	Combat Tanks	13,050	66
	Armored Fighting Vehicles	40,000	3,050
	Self-Propelled Artillery	4,000	0
	Towed Artillery	6,246	54
	Rocket Projectors	2,050	0
Persenjataan Udara	Fighters	1,222	78
	Attack	1,564	78
	Transport	193	39
	Trainers	368	162
	Total helicopter strength	1,004	157
	Attack helicopters	281	22
Persenjataan Laut	Aircraft carriers	1	2
	Frigates	52	10
	Destroyers	33	2
	Corvettes	42	0
	Submarines	76	6
	Patrol vessels	192	13
	Mine warfare	33	6

Sumber: (GFP, 2019)

Dapat dilihat pada Tabel 3.1 di atas, terdapat perbedaan yang cukup besar terhadap kekuatan persenjataan militer yang dimiliki oleh Tiongkok terhadap Australia. Dengan 3.187 peralatan militer udara, 700-an lebih peralatan militer laut dan peralatan angkatan darat yang lebih dari sepuluh kali lipatnya Australia, sudah lebih dari cukup untuk Australia mengantisipasi segala aktivitas Tiongkok di kepulauan Fiji.

Kepemilikan terhadap peralatan militer yang besar ini karena Tiongkok juga didukung oleh alokasi dana pertahanan yang besar tiap tahunnya (lihat Tabel 1.3). Berkaca dari sejarah yang terjadi, sebelumnya Tiongkok adalah negara yang bahkan pernah dijajah oleh tetangganya sendiri yaitu Jepang pada masa Manchuria, hal ini menimbulkan luka yang pada akhirnya dipercaya memacu

Tiongkok untuk memperbesar kemampuannya dalam berbagai bidang baik itu ekonomi, sosial hingga kemiliteran (Gries, Zhang, Masuki, & Lee, 2008, p. 263).

3.1.1 Pengalaman Konflik Militer Kedua Negara Dalam 100 Tahun Terakhir

Australia dan Tiongkok juga sama-sama berpengalaman dalam hal konflik peperangan dan memiliki sejarah yang cukup matang dalam perang berskala internasional. Hal ini dibuktikan dalam 100 tahun terakhir di mana ada beberapa konflik peperangan yang melibatkan kedua negara baik sebagai sesama aliansi atau sebagai musuh di medan perang.

Beberapa konflik peperangan yang dialami oleh kedua negara dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Konflik dan perang yang diikuti Australia-Tiongkok dalam 100 tahun terakhir

Konflik Australia dalam 100 tahun terakhir	Konflik Tiongkok dalam 100 tahun terakhir	Hubungan (Aliansi/Musuh, Tidak berhubungan)
Perang Dunia ke-1 (1914-1918)	Perang Sipil Tiongkok (1927-1950)	Tidak berhubungan
Perang Dunia ke-2 (1939-1945)	<i>Battle of Chamdo</i> (1950)	Tidak berhubungan
Perang Korea (1950-1953)	Perang Korea (1950-1953)	Musuh
Perang Vietnam (1965-1973)	Perang Vietnam (1965-1973)	Musuh
Perang Teluk (1990-1991)	Konflik Sino-Vietnam (1979)	Tidak berhubungan
<i>Operation Ocean Shield</i> (2009-2016)	<i>Operation Ocean Shield</i> (2009-2016)	Aliansi
<i>Terror</i> (2001-sekarang)	<i>War on Terror</i> (2001-sekarang)	Aliansi

Sumber: (List of war, 2013).

Dapat dilihat pada tabel di atas, Tiongkok dan Australia merupakan negara yang telah memiliki relasi perang dan konflik militer dalam 100 tahun terakhir.

3.1.2 Kecakapan *People Liberation Army (PLA)* Tiongkok Dalam Militer Global

PLA atau *People Liberation Army* atau yang dikenal dengan Tentara Pembebasan Tiongkok merupakan tentara nasional Tiongkok yang langsung berada di bawah komando Partai Komunis Tiongkok (PKC). PLA saat ini mengalami perkembangan baik secara internal dengan alokasi dana pertahanan yang besar dan juga secara eksternal dengan meningkatkan kerja sama militer asing demi menunjukkan kekuatan militer Tiongkok. PLA sendiri saat ini meningkatkan diplomasi ke setidaknya 110 negara dengan menjadi penasihat di bidang militer bagi kedutaan Tiongkok di berbagai negara tersebut (DIA, 2019, p. 19).

PLA yang bertugas di berbagai negara ini memungkinkan untuk mempelajari struktur komando asing, unit formasi dan pelatihan operasional dari negara tersebut. Selain dari mengirimkan perwakilan ke berbagai negara, PLA sendiri juga rutin mengirimkan pertukaran petugas untuk latihan tanding militer bersama agar dapat semakin meningkatkan hubungan secara militer yang telah terjalin. Perkembangan dan modernisasi PLA dalam strategi militer menjadi ancaman tersendiri bagi berbagai militer di dunia khususnya dari blok barat sekaligus memperkuat pengaruh Tiongkok di mata negara-negara berkembang.

PLA juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk diaspora Tiongkok yang tumbuh di kawasan Pasifik Selatan. Mengingat potensi kerusuhan antar etnis yang berbeda sangat besar terjadi di kawasan, dapat menjadi pembenaran bagi militer Tiongkok dalam mengerahkan PLA untuk memberikan

perlindungan bagi warga negaranya di negara-negara yang terdapat di kawasan Pasifik Selatan (Maclellan, 2018).

PLA melalui sebuah perusahaan di Tiongkok bernama CESEC (*Electronic Systems Engineering*), membayar perusahaan milik Tonga Royal Princess bernama Tomasat untuk mengizinkan satelit Tiongkok berada di kawasan langit kerajaan polinesia (Hille, 2019). PLA juga berupaya membangun landasan angkatan laut militer di wilayah Vanuatu untuk mempermudah berbagai operasi militer di wilayah tersebut, namun pembangunan militer ini ditutupi dengan alasan pembangunan pangkalan logistik (Gershaneck, 2018). Hal ini merupakan bentuk kemampuan dari PLA untuk dapat menanamkan militernya di kawasan Pasifik Selatan, dan dapat dikatakan hal ini menjadi ancaman bagi Australia sebagai sekutu Amerika Serikat sekaligus penjaga kawasan regional Pasifik Selatan.

3.1.3 Kemampuan Tiongkok Dalam Menjalin Kerja Sama Militer

Selain dari konflik dan peperangan, Tiongkok juga pernah dan saat ini masih mengikuti beberapa kerja sama kemiliteran yang melibatkan lebih dari satu negara. Kerja sama militer ini dapat berupa organisasi maupun pelatihan militer yang dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan dan pertahanan antar anggota di dalamnya. Kerja sama militer ini juga berpengaruh besar dalam *offensive capability* yang bisa dijadikan Australia sebagai patokan dalam mengukur kekuatan dan kemungkinan ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok apabila bersaing pengaruh di kawasan Pasifik Selatan. Beberapa organisasi dan kerja sama militer yang telah diikuti Tiongkok antara lain adalah *Shanghai Cooperation Organisation* dan UN PKO (*United National Peace Keeping Operations*) (Singh, 2011, pp. 796-800).

Organisasi Kerja Sama Shanghai atau SCO (*Shanghai Cooperation Organisation*) digambarkan sebagai saingan NATO dan merupakan organisasi antarbangsa di wilayah Asia yang beranggotakan Tiongkok, Kazahktan, Kirgiztan, Rusia, dan beberapa negara lainnya yang bertujuan untuk keamanan dan kerja sama lanjutan baik ekonomi, sosial dan budaya (Haas, 2011, p. 15). Organisasi SCO ini memiliki kekuatan yang cukup besar dalam bidang kerja sama militer antarbangsa, dengan adanya kerja sama militer yang besar dan kuat ini maka Tiongkok dapat memiliki kekuatan menjadi pelindung kawasan dan menarik dukungan dari negara-negara di Pasifik Selatan.

Sedangkan PKO merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh PBB untuk membentuk tentara-tentara yang berasal dari berbagai negara yang dapat diturunkan ke berbagai wilayah konflik di dunia untuk menjaga perdamaian (UN, 2019). Tiongkok berkomitmen mengirimkan 8.000 anggota yang bertugas sebagai tentara penjaga perdamaian di UNPKO dan siap diterjunkan dalam berbagai wilayah konflik. Hal yang menjadi penilaian dari keterlibatan Tiongkok dalam UNPKO ini adalah bahwa militer Tiongkok telah siap dalam mengatasi berbagai kemungkinan konflik yang dapat terjadi.

Dengan *offensive capability* yang Tiongkok miliki dan tunjukkan, maka Tiongkok memiliki kemungkinan besar untuk melakukan kegiatan yang bisa mengarah ke provokasi lebih lanjut untuk menantang pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini sesuai dengan kecenderungan negara-negara yang memiliki kemampuan ofensif yang lebih besar untuk memprovokasi negara lain yang bertentangan (Walt, 1985, p. 11). Hal lain yang perlu diantisipasi oleh Australia adalah berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan yang dibangun oleh

Tiongkok terhadap negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan secara perlahan akan melunturkan kepatuhan negara tersebut terhadap Australia yang telah ada selama ini.

3.2 *Offensive Intention*

Walt mendefinisikan *offensive intentions* sebagai adanya niat dari negara sumber ancaman yang terlihat bertindak agresif dalam penyebaran pengaruh, cenderung memprovokasi yang lain dengan berbagai kebijakan-kebijakan agresif sehingga seringkali menimbulkan gesekan kepentingan di antara keduanya.

Offensive Intentions. ...Finally, states that appears aggressive are likely to provoke others to balance against them. As I noted earlier, Nazy Germany provoked an overwhelming coalition against itself because it combined substantial power with extremely offensive ambitions. Indeed, even states with rather modest capabilities may trigger a balancing response if they are perceived as especially aggressive (Walt, 1985, p. 12).

Dalam hal ini Tiongkok sebagai sumber ancaman atas hegemoni Australia di kawasan Pasifik Selatan telah melakukan berbagai hal yang dapat dianggap sebagai kegiatan dengan niat memprovokasi Australia. Kegiatan-kegiatan ini menjadi tolok ukur Australia dalam melihat perilaku agresif Tiongkok, karena menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan *offensive capability*.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok di beberapa negara di kawasan yang menunjukkan adanya niatan untuk bersikap ofensif di antaranya adalah:

3.2.1 Upaya pendanaan Tiongkok atas kamp militer Blackrock di Fiji

Tiongkok berupaya untuk menjalin kerja sama di bidang militer dengan Fiji, seperti yang pernah disebutkan oleh duta besar Tiongkok bagi Fiji yang secara terbuka siap membantu mendirikan pangkalan angkatan laut baru. Tiongkok juga menyumbangkan kapal pengintai jenis terbaru bernama Yuanwang-7, 50 unit

kendaraan polisi dan kerja sama pelatihan bersama antar polisi kedua negara di Fiji (Riordian, 2018).

Salah satu proyek kerja sama militer lain yang sempat ditawarkan oleh Tiongkok yaitu kerja sama terkait pembiayaan *Blackrock Camp Military* yang terdapat di Fiji. Kerja sama ini disampaikan oleh juru bicara Tiongkok yang terdapat di Fiji adalah upaya asli di bawah kerja sama Selatan-Selatan dengan bertujuan membantu negara-negara pulau mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran tanpa ada keinginan menargetkan pihak lain (Chinese Embassy spokesperson criticizes Australian media reports regarding the Black Rock Camp project, 2018). Hal ini memicu pihak Australia untuk turut campur dalam merebut proyek kerja sama pembangunan kamp militer ini, mengingat jika ini proyek ini berhasil didapatkan oleh Tiongkok, dengan asumsi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh Tiongkok terhadap keamanan kawasan menjadi semakin besar.

Persaingan untuk bekerja sama dalam mendanai proyek *Blackrock camp* ini akhirnya dimenangkan oleh Australia setelah menawarkan pendekatan yang lebih secara holistik/menyeluruh dalam proposal pendanaan dibandingkan dengan Tiongkok yang terkesan hanya menawarkan bantuan terpisah dan sepotong-sepotong (Mudaliar, 2018). Dengan klaim yang sama seperti yang disebutkan oleh Tiongkok, kerja sama yang terjalin antara Australia-Fiji dalam MoU *Blackrock camp* merupakan pivot strategis bagi Australia untuk terus berinvestasi ke kawasan regional demi tercapainya perdamaian, kemakmuran dan stabilitas melalui kemampuan pertahanan yang mumpuni (Kuper, 2019).

Setelah mengamankan kamp militer Blackrock, Australia menunjukkan perhatian lebih lanjut terhadap keamanan kawasan regional dan meningkatkan

keamanan perairan di Fiji dan sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya *Join Boarding Operation* antara angkatan laut Australia-Fiji dengan tujuan kerja sama ini untuk menjaga domain maritim bersama (Daily , 2018). Pelatihan bersama angkatan laut ini juga disaksikan oleh negara-negara lain seperti Kamboja, Tonga, Timor Leste dan Tuvalu yang berdampak menegaskan kembali pengaruh Australia sebagai penjaga stabilitas dan keamanan regional.

3.2.2 Belt Road Initiative(BRI)

Belt Road Initiative atau BRI merupakan strategi pembangunan yang diperkenalkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Xi Jinping, untuk menghidupkan kembali jalur sutra perdagangan Tiongkok di masa lampau. BRI berfokus pada konektivitas dan kerja sama yang dibangun sekaligus menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, Eurasia, Afrika, Samudera Hindia dan pasifik. BRI merupakan proyek yang krusial untuk Tiongkok, mengingat BRI dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama strategis dalam infrastruktur, investasi dan bisnis dengan 65 negara lain yang secara kolektif mencakup 75% cadangan energi yang di ketahui, 62% populasi, dan lebih dari 30% produk domestik bruto global (Litelnoni, 2019).

Namun kritikan muncul terhadap proyek BRI ini, di mana Tiongkok sebagai negara dengan keuangan yang besar menggunakan kelebihan tersebut untuk mendominasi negara dengan ekonomi yang kecil. Dengan menggunakan iming-iming bantuan ekonomi dan pinjaman lunak, Tiongkok dapat mengontrol infrastruktur, SDA dan aset-aset penting dari negara kecil tersebut (Wade, 2016).

Tiongkok juga melakukan upaya-upaya untuk memperluas BRI dengan menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Selandia baru, Vanuatu, Fiji, Cook, Samoa, Tonga dll. Upaya ini dilakukan secara perlahan oleh Tiongkok melalui berbagai bantuan ekonomi dan pinjaman lunak jangka panjang. Pada akhirnya upaya ini mulai menunjukkan hasil seperti dibangunnya pelabuhan perairan di Pulau Penhryn di Cook, jalan Tol sepanjang 64 km dan dermaga di Niue. Negara Tonga juga mendapat keringanan pembayaran hutang awal sebesar 65 juta USD dengan catatan hutang tersebut bertambah dengan bunganya menjadi 115 juta USD pada saat jatuh tempo kedepan (Ellis & Devonshire, 2019). Untuk Fiji sendiri, Tiongkok selain menawarkan bantuan pinjaman lunak juga melakukan investasi yang cukup besar terutama dalam infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata di sekitar pulau-pulau yang terdapat di Fiji.

Tabel 3. 3 Nilai Bantuan Investasi terkait Belt Road Initiative (BRI) Tiongkok di Kepulauan Pasifik

Nomor	Negara	Nilai Bantuan Investasi dari Tiongkok (Kumulatif 2006-2016)
1	Fiji	359,8 juta USD & 37 proyek infrastruktur
2	Vanuatu	243,48 Juta USD & 25 proyek infrastruktur
3	Samoa	230 juta USD & 36 proyek infrastruktur
4	Tonga	172 juta USD & 35 proyek infrastruktur
5	Kepulauan Cook	49,8 juta USD & 13 proyek infrastruktur

Sumber: (Bran & Jiawei, 2016)

Secara garis besar negara-negara yang disebutkan di atas turut membantu melancarkan jalannya proyek BRI yang dimiliki oleh Tiongkok di wilayah Kepulauan Pasifik dengan menyetujui berbagai pembangunan yang dilakukan

oleh Tiongkok di dalam negeri masing-masing. Padahal secara jelas negara-negara tersebut selama ini berada di bawah komando Amerika Serikat melalui perpanjangan tangan Australia.

Tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai oleh Tiongkok dengan berupaya membangun kamp militer Blackrock di Fiji juga adalah demi melancarkan jalannya BRI itu sendiri. Terlepas dari berbagai interpretasi baik yang diberikan seseorang terhadap proyek BRI, upaya Tiongkok bekerja sama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik terus mengalami peningkatan. Dan di bawah proyek BRI sejauh ini memperjelas keterikatan ekonomi yang kuat terbangun diantara Tiongkok-Pasifik Selatan. Hal ini mau tidak mau memaksa Australia untuk kembali memperkuat hubungan yang dibangun dengan negara-negara tersebut, mengingat BRI adalah salah satu bentuk *offensive intentions* Tiongkok di negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang menjadi salah satu jalur maritim internasional dan memiliki sumber daya alam dan laut yang potensial.

3.2.3 RAMSI, peran Australia dalam politik dalam negeri Solomon dan pengaruh Tiongkok

RAMSI (*Regional Assistance Mission to Solomon Island*) merupakan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia untuk mengatasi konflik etnis yang terjadi di Kepulauan Solomon pada rentang waktu 1998-2003. Awalnya, permohonan permintaan bantuan yang diajukan oleh Ulufa'alu selaku Perdana Menteri Kepulauan Solomon tidak dipedulikan oleh Australia karena hal tersebut dilihat sebagai problematika dalam negeri yang harus diselesaikan oleh pemerintah Solomon sendiri.

Namun pada tahun 2003, di bawah keputusan John Howard Australia merubah kebijakannya dan bersedia memimpin pasukan untuk mengintervensi konflik yang terjadi karena ketidakmampuan Pemerintah Solomon. Australia membentuk RAMSI di bawah naungan PIF dan didukung oleh beberapa negara seperti Selandia Baru, Fiji, PNG, Samoa, Vanuatu, dan lainnya (Hoadley, 2005, p. 10). Perubahan keputusan Australia di bawah Howard ini karena ketidakamanan yang terjadi di Kepulauan Solomon akan berdampak merugikan kepentingan Australia dalam hal keamanan. Hal ini karena keamanan Australia membutuhkan kawasan yang stabil dan negara-negara di sekitarnya haruslah bebas dari konflik sehingga tidak memunculkan ketidaknyamanan bagi semua pihak yang ada di dalamnya.

Selain itu, berdasarkan pandangan dalam liberal bahwa akan lebih mudah menjalin hubungan kerja sama dengan negara yang memiliki ideologi yang sama, dengan acuan ini maka kudeta di Solomon perlu diberantas dan itu merupakan tugas Australia sebagai *order of domestic politic* dalam menyebarkan demokrasi di kawasan. Dalam kebijakan ini Australia mengeluarkan biaya yang besar untuk mengatasi konflik etnis dan memperkuat institusi pemerintahan di Kepulauan Solomon sehingga tidak terjadi lagi konflik berkelanjutan (Holland & McDonald, 2010, pp. 6-7).

Kondisi Rapuh yang di alami oleh Kepulauan Solomon selama konflik kemudian dimanfaatkan oleh Tiongkok dengan kedatangannya dengan maksud untuk memuluskan kebijakan '*One China Policy*' di Kepulauan Solomon. Tiongkok hadir memberikan bantuan ekonomi kepada pemerintahan Solomon dengan maksud untuk menekan Taiwan, namun bantuan ekonomi yang diberikan

tidak mampu menyelesaikan konflik dan malah memperburuk keadaan wilayah tersebut karena korupsi yang terjadi malah semakin meningkatkan perpecahan antar penduduk.

Pada dasarnya negara-negara di Pasifik Selatan memiliki kondisi perekonomian yang lemah, dan hal ini menjadi celah untuk dimanfaatkan dalam persaingan politik negara-negara lain dalam bersaing pengaruh. Politik-politik berupa bantuan ekonomi yang ditawarkan Tiongkok malah justru memperparah keadaan di Kepulauan Solomon dan berpotensi sebagai jebakan hutang (Febriani, 2018, pp. 15-17). Keinginan Tiongkok untuk memuluskan *'One China Policy'* di Kepulauan Solomon dengan bantuan berbagai paket ekonomi, malah menjadikan negara tersebut lemah dan rawan konflik sehingga Australia perlu mengambil sikap seperti yang ditunjukkan dalam RAMSI.

3.2.4 Tiongkok berupaya membangun pangkalan militer di Vanuatu

Tiongkok juga mulai mendekati Vanuatu dalam hal membangun kerja sama militer yang bersifat permanen di negara kepulauan tersebut. Jika kerja sama ini disetujui oleh kedua belah pihak dan berhasil dilaksanakan, maka akan ada sebuah pangkalan militer yang berjarak hanya sekitar 2000 kilometer dari lepas pantai negara Australia (Wroe, 2018). Upaya untuk mendapatkan kerja sama ini berpeluang memiliki keberhasilan untuk dijalankan mengingat Tiongkok telah mengeluarkan ratusan juta dollar untuk membantu pemerintah Vanuatu.

Tiongkok selain ingin memproyeksikan kemampuannya dengan berbagai bantuan ekonomi, pinjaman lunak dan pembangunan infrastruktur tetapi juga ingin memproyeksikan kekuatan militernya sehingga negara seperti Vanuatu

merasa telah mengambil keputusan yang tepat dengan bekerja sama dengan negara yang baik dan kuat.

Upaya kerja sama yang dibangun Tiongkok-Vanuatu ini, membuat Menteri Luar Negeri Australia saat itu yaitu Julie Bishop bersama pangeran Charles mengambil inisiatif berkunjung ke Vanuatu. Kunjungan ini untuk menunjukkan manfaat dari komitmen Persemakmuran terhadap Vanuatu dan menekan pengaruh Tiongkok agar tidak semakin melebar. Karena berapapun kecilnya peluang pendirian angkatan laut Tiongkok di Vanuatu, akan mempengaruhi kebijakan pertahanan pemerintahan Australia hingga beberapa dekade kedepan (Chibarirwe, 2018).

3.2.5 Intervensi tidak langsung atas pemberlakuan sanksi Kudeta Militer di Fiji

Contoh lain dari *offensive intentions* Tiongkok adalah adanya upaya intervensi secara tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri Australia terhadap Fiji. Hal ini ditunjukkan dalam kasus perpolitikan internal Fiji yang seringkali mengalami kudeta yang dilakukan oleh pihak militer kepada pemerintah resmi yang berjalan. Perebutan paksa dalam kekuasaan yang dilakukan oleh militer di Fiji, seharusnya merupakan konflik internal negara Fiji. Namun sama halnya dengan kasus RAMSI di Kepulauan Solomon, Australia sebagai negara yang berusaha menyebarkan sistem demokrasi di seluruh negara yang ada di Kepulauan Pasifik Selatan menganggap hal ini adalah sebuah kesalahan dan berprioritas mengancam stabilitas kawasan sehingga Australia sering mengirimkan tentara untuk menstabilkan perpolitikan di Fiji paska kudeta (Firth, 2005, p. 170).

Kejadian ini tidak lepas dari seringnya konflik etnis berkepanjangan yang terjadi di beberapa negara di Kepulauan Pasifik Selatan sehingga seringkali di kenal dengan julukan *the arc of instability* atau kawasan yang tidak stabil (Dibb, Hale, & Pince, 2006, p. 18). Jika ditarik dari studi kasus terbentuknya *Regional Assistance Mission to Solomon Island* (RAMSI) yang diprakarsai Australia pada tahun 2003 dan mendapat persetujuan di PIF. Maka upaya yang dilakukan oleh Australia untuk mengatasi konflik berkepanjangan di kepulauan Solomon sejak 1998 ini adalah untuk menunjukkan *Regional Powers* Australia terhadap kawasan Pasifik Selatan. *Regional Powers* sendiri merupakan upaya bagi sebuah negara untuk menjalankan kepemimpinan dalam lingkup regional asumsinya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian (Mulugeta, 2014, p. 7).

Kasus kudeta terakhir yang dapat menggambarkan *offensive intention* Tiongkok adalah kudeta yang terjadi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Frank Bainarama terhadap pemerintahan resmi Fiji (DW, 2006). Dengan pemberian sanksi oleh Australia berupa pemotongan bantuan, isolasi visa hingga ancaman pembekuan keanggotaan Fiji dari PIF, diharapkan agar pemerintahan di Fiji berjalan demokratis kembali (Gaglioti, 2009). Namun, Tiongkok justru mengambil kesempatan ini dengan mengisi kekosongan posisi sebagai pendonor bantuan bagi Fiji dan menjalin hubungan kerja sama lebih intens terhadap Fiji. Apapun hal yang terjadi di Fiji berimbas dalam pengambilan kebijakan luar negeri Australia.

Pemberian sanksi yang dilakukan oleh Australia kepada Fiji sebagai bentuk pengingat bahwa Australia peduli terhadap perkembangan demokrasi di Fiji karena itu adalah *concern* Australia dalam membantu negara-negara di kepulauan

Pasifik Selatan. Namun Pemerintah Tiongkok justru memberikan bantuan hibah langsung dengan alasan Fiji telah mendukung kebijakan *one china policy* kepada Bainarama yang justru memperpanjang nafas dari para pelaku kudeta di Fiji (Guixia , 2015).

Respon dari pemerintahan Fiji terhadap sanksi Australia dan tindakan dari Tiongkok adalah dengan mengeluarkan kebijakan '*look north policy*'. Kebijakan ini mengarahkan pandangan Fiji untuk tidak lagi terbatas hanya pada Australia, namun hubungan kerja sama yang dibangun juga bisa berpandangan pada negara-negara di wilayah utara termasuk di dalamnya Tiongkok (Komai, 2015, p. 113).

Tindakan-tindakan ini secara tidak langsung menggoyahkan posisi tawar menawar Australia di Fiji sekaligus menunjukkan upaya provokasi terhadap kebijakan luar negeri Australia di Fiji yang dilakukan oleh Tiongkok. Tiongkok juga secara tidak langsung menghambat upaya penyebaran demokrasi oleh Australia dengan cara memberi dukungan berupa sikap non-intervensi terhadap sistem pemerintahan hasil kudeta militer yang terjadi di Fiji, tidak mengindahkan upaya Australia-PIF mengisolasi Fiji dan mengubah kepatuhan Fiji terhadap Australia yang ditunjukkan dengan '*look north policy*'.

3.3 Strategi Jeratan Hutang Tiongkok

Dari 4 hal yang telah di sebutkan sebelumnya terkait adanya kemampuan berupa Aggregate Power, Proximity, Offensive Capability dan Offensive Intentions yang dimiliki oleh Tiongkok sehingga berpotensi dalam mengancam hegemoni Australia. Penulis akan menambahkan satu hal terkait kemampuan yang dimiliki Tiongkok dalam membuat negara-negara di Pasifik Selatan seperti Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan lainnya dapat tunduk pada pengaruh Tiongkok

tanpa sadar. Kemampuan tersebut adalah bantuan ekonomi dan pinjaman lunak yang berpotensi sebagai jebakan hutang.

Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Tiongkok dalam menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Dengan dukungan sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, bantuan-bantuan berupa kucuran dana segar hingga pembangunan proyek infrastruktur vital yang ditawarkan sangat memberikan pengaruh bagi negara-negara yang menerima bantuan ekonomi Tiongkok tersebut. Namun, pepatah Tiongkok lama mengatakan ‘Tidak ada makan siang gratis di dunia ini’, dan hal ini juga berlaku dalam kasus bantuan ekonomi dan pinjaman lunak Tiongkok bagi negara-negara di Pasifik Selatan.

3.3.1 Bantuan ekonomi Tiongkok bagi Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon (Solomon Island) merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di samudera pasifik dan digolongkan sebagai kawasan benua Oseania. Kepulauan Solomon terdiri atas 992 pulau, dengan ibukota yaitu Honiara yang terletak di pulau Guadalcanal.

Kepulauan solomon sebagai salah satu negara yang berada di Pasifik Selatan semakin meningkatkan hubungan diplomatik yang dibangun dengan Tiongkok. Hubungan diplomatik ini menjadi sinyal berkembangnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan dan hal tersebut untuk mempermudah dalam memantapkan kebijakan *One China Policy* di kawasan tersebut. Kebijakan ini membuat Kepulauan Solomon harus mengalihkan hubungannya secara keseluruhan dari Taiwan ke Tiongkok.

Kepulauan Solomon sendiri merupakan mitra dagang dari Tiongkok yang berperan dalam memasok beberapa sumber daya alam seperti sejumlah besar kayu dan ikan yang mana ini merupakan komoditi yang dibutuhkan oleh Tiongkok sebagai sebuah negara industri yang besar sekaligus menjalin hubungan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Wesley-Smith, 2013, pp. 362-363). Kepulauan Solomon juga meneken sebuah perjanjian kerja sama dalam gagasan kebijakan unggulan luar negeri Tiongkok yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) sehingga kedepannya diharapkan meningkatkan perekonomian kedua negara (Andriana, 2019). Bantuan lain yang diterima oleh Kepulauan Solomon terkait dalam bidang ekonomi, yaitu pemberian bantuan sebesar 500 juta USD yang diharapkan dapat membantu pembangunan proyek dan infrastruktur di negara tersebut (Perdana, 2019).

Upaya-upaya dilakukan oleh Australia untuk membendung pengaruh Tiongkok di Kepulauan Solomon, seperti kunjungan Perdana Menteri Scott Morrison ke Kepulauan Solomon, meningkatkan bantuan ekonomi dan hibah dari Australia-Amerika Serikat hingga upaya pembangunan kabel telekomunikasi untuk mempermudah akses teknologi di negara tersebut (Rozi, 2019). Pembangunan kabel ini sendiri merupakan hasil dari tekanan diplomatik dan intervensi intelijen pemerintah Australia terhadap Kepulauan Solomon, karena Australia tidak menginginkan Kepulauan Solomon memberi jalan Huawei selaku perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok untuk melakukan pembangunan jaringan tersebut.

3.3.2 Pengaruh pebisnis Tiongkok dalam kebijakan dalam negeri Kepulauan Marshall

Kepulauan Marshall juga merupakan salah satu negara kecil yang terdapat di kawasan Kepulauan Pasifik yang mendapat perhatian Tiongkok. Sebagai salah satu negara yang termasuk dari 6 negara di Pasifik Selatan yang dikenal mendukung Taiwan, Kepulauan Marshall menjadi target Tiongkok untuk memuluskan kebijakan *One China Policy*. Berbagai kegiatan dilakukan Tiongkok dalam menjalin hubungan yang lebih baik dan dekat dengan Marshall dengan maksud memenangkan hati dari pemerintah Marshall dan mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan dan menolak Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat.

Pengaruh pebisnis Tiongkok juga dapat dilihat dalam kebijakan internal pemerintah Kepulauan Marshall. Pemerintahan yang berjalan di Kepulauan Marshall, di mana pada tahun 2018 sempat mengalami pertentangan pada saat pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi negara tersebut. Kebijakan tersebut terkait pengadopsian mata uang krypto/ *cryptocurrency* agar memiliki dasar hukum dan dapat digunakan di dalam negeri. Namun, kebijakan ini mendapat tentangan dan kritikan dari beberapa senator yang di anggap terhubung dengan beberapa pebisnis Tiongkok yang menganggap keputusan tersebut beresiko merugikan pebisnis Tiongkok tersebut. Penentangan ini ditanggapi oleh Presiden Hilda Heine selaku eksekutif tertinggi Kepulauan Marshall sebagai akibat dari pengaruh Tiongkok yang sudah terlalu jauh tumbuh di Kepulauan Pasifik, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan perpolitikan dalam negeri (Guardian, 2018).

3.3.3 Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Kepulauan Cook

Tiongkok menjalin hubungan diplomasi dengan Kepulauan Cook sejak tahun 1997. Meski hubungan ini sempat mendapat kritikan, namun pemerintah Kepulauan Cook tetap aktif dalam menerima bantuan ekonomi dari Tiongkok. Kepulauan Cook juga merupakan salah satu negara yang mendapat bantuan berupa hibah ekonomi dan pembangunan infrastruktur dari Tiongkok. Sejak tahun 2006 hingga 2013 Tiongkok telah memberikan bantuan ekonomi sebesar 33 juta USD kepada Kepulauan Cook lebih besar daripada Australia yang hanya sekitar 26,8 juta USD. Tiongkok juga membantu pembangunan proyek infrastruktur dalam bidang agrikultur, perikanan, pemerintahan dan masyarakat sipil hingga pendidikan (Brant, *Chinese Aid in the Pacific: Cook Island Snapshot*, 2015). Tindakan ini untuk menunjukkan bahwa Tiongkok adalah mitra kerja sama yang baik di mata Kepulauan Cook dan negara kecil lain di sekitarnya.

Salah satu program pertama yang di jalankan oleh Tiongkok di Kepulauan Cook adalah Proyek Te Mato, yaitu proyek untuk meningkatkan pasokan air bersih ke pulau Rarotonga yang berada di Kepulauan Cook yang dijalankan oleh 3 negara yaitu Tiongkok-Selandia Baru-Kepulauan Cook (Zhang, 2015). Proyek pembangunan ini merupakan salah satu dari berbagai bantuan ekonomi dan infrastruktur yang ditawarkan oleh Tiongkok. Namun, yang menjadi pokok persoalan adalah semuanya merupakan bentuk dari pinjaman lunak yang diberikan oleh Tiongkok kepada Cook Island dan tetap harus dibayar pada saat jatuh tempo. Tidak hanya konsekuensi terbatas pada pembayaran hutang, namun juga hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan proyek infrastruktur didapatkan oleh para pebisnis dari Tiongkok (Hannan & Firth, 2015, pp. 879-880).

Hal yang ditakuti dan menjadi efek jangka panjang dari ketidakmampuan membayar hutang ini kedepannya adalah munculnya konflik di dalam negeri dari Kepulauan Cook. Konflik ini akan muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak bisa membayar hutang sehingga harus jatuh ke dalam jeratan Tiongkok. Efek selanjutnya secara pasti adalah ketidakstabilan negara yang berimbas pada ketidakstabilan keamanan kawasan dan membahayakan keamanan dari Australia sebagai pihak yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kawasan.

3.3.4 Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Samoa

Tiongkok telah menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Samoa sejak tahun 1975 beberapa tahun setelah Samoa memperoleh kemerdekaan. Hubungan yang dibangun oleh Tiongkok di Samoa selain sebagai mitra kerja sama juga pernah memiliki tujuan untuk menekan pengaruh Uni Soviet di Pasifik Selatan pada masa Perang Dingin. Alasan Samoa memilih untuk lebih dekat kepada Tiongkok dibanding Uni Soviet dan Amerika Serikat pada masa itu adalah, karena Tiongkok dianggap sebagai kekuatan besar yang tidak langsung terlibat dalam konflik selama Perang Dingin, sehingga kemudian Samoa mengizinkan pembangunan Kedutaan Tiongkok di Apia ibukota negara Samoa (Wesley-Smith & Porter, 2010, pp. 152-154).

Hubungan kedua negara paska Perang Dingin semakin kuat terutama dalam penguatan ikatan sosial dan budaya dan Tiongkok kemudian juga memberikan bantuan di bidang peningkatan kesehatan, infrastruktur dan kerja sama perdagangan. Samoa sama seperti negara pembangunan pada umumnya juga menerima bantuan pinjaman lunak dari Tiongkok, dengan jumlah yang cukup

besar seperti pada rentang tahun 2006-2013 sebesar 145,6 juta USD. Dana ini dipergunakan untuk pembangunan sektor pemerintahan dan masyarakat sipil sebanyak 39%, Kesehatan sebanyak 29%, pendidikan 12% dan 20% sisanya pada berbagai sektor lain (Brant, 2015).

Wesley-Smith mengatakan dalam bukunya, bahwa kehadiran Tiongkok yang menguat di negara-negara Pasifik mempengaruhi serta mengurangi kekuatan pihak barat seperti Australia dan Amerika Serikat adalah hal yang lumrah. Namun, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah yang besar mengingat apa yang Tiongkok lakukan adalah membantu membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya dan skill termasuk di Samoa.

To be sure, China's growing presence and influence may reduce the influence of Western powers in the region, particularly Australia and the United States. But why should this be regarded as problematic, given that there is a feeling that the islands have been neglected by their traditional allies? Moreover, China's increasing presence in the region has provided considerable infrastructural development and boosted resources and skill within many Pacific Island countries (Wesley-Smith T., 2013, p. 160).

Australia sebagai hegemoni di wilayah Pasifik merespon dengan kembali meningkatkan hubungan dengan Samoa yaitu memberikan bantuan ekonomi kepada Samoa. Sepanjang tahun 2006-2016 tercatat Australia memberikan bantuan sejumlah 242,6 juta USD, kemudian pada tahun 2016 juga Samoa menerima kunjungan 3 Menteri dan 1 Duta Besar Australia dengan maksud untuk merayakan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara (Likou, 2017). Program-program bantuan dan peningkatan seperti reformasi ekonomi dan pemerintahan, perbaikan infrastruktur sekolah berstandar universal, kemitraan kesehatan bertujuan peningkatan sumber daya medis, hingga beasiswa pendidikan diberikan oleh Australia dalam rangka mencerminkan bahwa hubungan Australia dengan Samoa semakin erat baik-baik saja (Australian Government, 2018).

3.3.5 Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Tonga

Tonga merupakan negara berpenduduk sekitar 104,000 jiwa yang awalnya menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 1972, namun kemudian beralih menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1998. Tiongkok hadir di Tonga dengan menawarkan pinjaman berbunga rendah hingga sebesar 172 juta USD (hampir mencapai 50% PDB Tonga) sejak 2006 hingga 2016, bantuan pinjaman lunak ini juga disertai dengan bantuan pembangunan infrastruktur terkait transportasi, kesehatan dan multi-sektor lainnya (Bran & Jiawei, 2016). Namun seperti halnya negara kecil lain di Pasifik Selatan, Tonga memiliki ketakutan akan ketidakmampuan membayar hutang kepada Tiongkok dan akhirnya malah akan terjatuh sehingga Tiongkok malah akan diuntungkan pada akhirnya. Metode yang disebut pengamat dari Australia sebagai ‘perangkap hutang’ ini dimaksudkan untuk mendapatkan akses kendali terhadap titik-titik strategis yang terdapat di Tonga seperti pelabuhan, kamp militer dan infrastruktur vital lainnya. Australia sendiri telah membantu mengucurkan bantuan ekonomi sebesar 180 juta USD untuk membantu pembangunan di Tonga, sekaligus menahan laju pengaruh Tiongkok.

Tidak hanya bantuan ekonomi dan pinjaman lunak yang mengalir dari pemerintah Tiongkok ke Tonga, namun juga mengalir pendatang atau imigran dari Tiongkok terutama semenjak Pemerintah Tonga mulai menjual passport. Passport ini awalnya digunakan untuk menarik para pebisnis-pebisnis kaya Tiongkok, namun ternyata justru penduduk pedesaan Tiongkok yang menangkap kesempatan ini. Kedatangan imigran ini menimbulkan persaingan terhadap peluang kerja yang

cukup kecil di Tonga, bahkan penduduk lokal sudah merasa menjadi bagian dari penduduk Tiongkok itu sendiri (Perry, 2019).

Jika dilihat mungkin aliran imigran yang masuk ke Tonga ini dalam lingkup yang kecil hanya akan berpengaruh terhadap masyarakat Tonga sendiri, namun jika ini terus berlanjut maka tidak tertutup kemungkinan kedepannya Australia akan kehilangan pengaruhnya di Tonga karena semakin kuatnya pengaruh Tiongkok terhadap negara tersebut.

3.3.6 Bantuan ekonomi Tiongkok bagi Vanuatu

Tiongkok telah menjalin hubungan diplomatik dengan Vanuatu sejak tahun 1982. Namun Vanuatu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Serge Vohor pada tahun 2004 mengalihkan dukungannya kepada Taiwan, tetapi pada tahun 2011 kembali untuk mengakui Tiongkok di bawah kebijakan *One China Policy*. Vanuatu menggunakan diplomasi seperti ini untuk mendapat bantuan yang lebih dari Tiongkok, dan terhitung telah mendapat bantuan pinjaman lunak sebesar 243 juta USD serta proyek pembangunan infrastruktur, pelayanan jasa, transportasi dan pendidikan sepanjang tahun 2006 hingga 2016 (Brant, *Chinese Aid in the Pacific: Vanuatu snapshot*, 2015).

Sama seperti negara-negara kecil lain yang mendapat bantuan pinjaman lunak Tiongkok dalam jumlah yang besar sehingga diprediksi tidak bisa membayar hutang, Vanuatu termasuk salah satu dari negara kecil tersebut. Hal ini tentu berimbas pada adanya kemungkinan Vanuatu akan jatuh dalam jerat hutang Tiongkok dan besar kemungkinan dapat diintervensi dalam tiap pengambilan kebijakan strategis negara tersebut.

Tabel 3. 4 Tingkat Ancaman Tiongkok terhadap Australia di negara kawasan Pasifik Selatan

Negara	Tingkat Ancaman (<i>The Level of Threat</i>) Tiongkok	Respons dan Kebijakan Australia
Fiji	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak tanpa ada upaya intervensi paska kudeta 2006 - Lahirnya kebijakan '<i>look north policy</i>' - Upaya pendanaan Tiongkok atas kamp militer Blackrock - Inisiasi <i>BRI</i>, pembangunan infrastruktur pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Lobi dan intervensi untuk memenangkan proyek kamp militer Blackrock dari tangan Tiongkok - Peningkatan hubungan diplomatik melalui <i>Join Boarding Operation Australia-Fiji</i>
Negara	Tingkat Ancaman (<i>The Level of Threat</i>) Tiongkok	Respons dan Kebijakan Australia
Kepulauan Cook	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima bantuan ekonomi, pinjaman lunak dan pembangunan infrastruktur sebesar 33 juta USD (2006-2013) - Proyek Te Mato - Inisiasi <i>BRI</i>, pembangunan pelabuhan di Pulau Penhryn, jalan tol dan dermaga di Niue 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik - Pemberian hibah dan bantuan ekonomi
Kepulauan Marshal	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik untuk mencapai <i>One China Policy</i> - Pengaruh para pebisnis Tiongkok dalam esekutif pemerintah Marshal 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik
Samoa	<ul style="list-style-type: none"> - Di izinkan oleh Samoa membangun kedutaan Tiongkok sejak Perang Dingin - Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak sebesar 145,6 juta USD untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur - Inisiasi <i>BRI</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik melalui kunjungan Menteri Australia ke Samoa - Memberikan bantuan ekonomi sebesar 242,6 juta USD (2006-2013) dan masih berlanjut hingga saat ini.

Kepulauan Solomon	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak hingga 500 juta USD paska Ramsi - Inisiasi <i>BRI</i>, dukungan Solomon bagi kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik melalui kunjungan PM Scott Morison - Peningkatan jumlah bantuan ekonomi dan hibah - Memenangkan proyek kerja sama pembangunan kabel telekomunikasi dari Tiongkok di Kepulauan Solomon
Tonga	<ul style="list-style-type: none"> - Alih dukungan terhadap <i>One China Policy</i> - Pinjaman sebesar 172 juta USD dengan bunga yang rendah - Imigran Tiongkok berdatangan paska jual beli Passport Tonga - Inisiasi <i>BRI</i>, keringanan pembayaran hutang sebesar 65 juta USD 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik dan pemberian dana bantuan ekonomi hingga 180 juta USD untuk peningkatan pembangunan infrastruktur
Vanuatu	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya membentuk dukungan <i>One China Policy</i> di Vanuatu - Upaya kerja sama dalam membangun pangkalan militer - Memberikan bantuan ekonomi dan pinjaman lunak serta pembangunan infrastruktur sebesar 243 juta USD - Inisiasi <i>BRI</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik diperkuat - Kunjungan Menlu Australia Julie Bishop bersama Pangeran Charles

BAB IV

KESIMPULAN

Meningkatnya kehadiran Tiongkok di negara-negara yang terdapat di Pasifik Selatan memberikan pengaruh bagi Australia sebagai hegemoni dari kawasan tersebut. Pasifik Selatan yang dihuni oleh negara-negara kepulauan seperti Fiji, Samoa, Vanuatu, Kepulauan Marshal, Kepulauan Cook, Kepulauan Solomon dan Tonga telah menjalin hubungan kerja sama yang cukup intens dengan Tiongkok dalam berbagai bidang terutama dalam hal ekonomi dan bantuan pembangunan infrastruktur. Tiongkok juga cukup murah hati dengan memberikan pinjaman dana lunak jangka panjang kepada negara-negara tersebut. Namun, ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok ini menjadi ancaman terhadap dominasi dan hegemoni yang selama ini dibangun oleh Australia.

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan empat indikator pendekatan dari Stephen M. Walt, yaitu *aggregate power*, *proximity*, *offensive capability* dan *offensive intentions* dalam menganalisis kehadiran Tiongkok di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Penulis mendapat temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kehadiran Tiongkok dapat mengancam pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan.

Pertama, terkait dengan faktor *aggregate power* yaitu penilaian terhadap sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh Tiongkok sehingga bisa menjadi ancaman bagi Australia. Sumber daya ini di antaranya terkait populasi di mana Tiongkok memiliki populasi yang lebih besar di bandingkan Australia, populasi ini berimbas kepada perkembangan industri yang menghasilkan keuntungan besar

dan menghasilkan GDP yang tinggi bagi Tiongkok. Dengan ketersediaan dalam sumber daya manusia yang besar dan GDP yang tinggi, alokasi terhadap dana pertahanan dan kemiliteran Tiongkok juga naik sehingga menempatkan Tiongkok di posisi ke-3 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Pada faktor pertama ini, *aggregate power* Tiongkok lebih superior di bandingkan Australia.

Kedua, terkait dengan faktor *proximity* atau kedekatan posisi geografis sumber ancaman. Dalam hal ini Tiongkok berpeluang menjadi ancaman bagi Australia melalui kedekatan hubungan yang dibangun Tiongkok dengan Indonesia di wilayah selatan Australia, kemudian peluang ancaman ini semakin besar dengan hubungan yang dibangun Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Poros atau pivot yang terbentuk dari hubungan kerja sama intens yang telah dibangun oleh Tiongkok di Indonesia bertambah dengan hubungan kerja sama yang dibangun juga di wilayah Pasifik Selatan. Dengan kata lain potensi ancaman semakin meningkat bagi Australia berdasarkan *proximity* dengan Tiongkok dapat bersumber baik dari Indonesia maupun dari negara wilayah Pasifik Selatan seperti Fiji, Vanuatu, Samoa, dan lainnya.

Ketiga, terkait dengan faktor *offensive capability* atau disebut juga *offensive power* dimana kemampuan militer suatu negara yang besar untuk melakukan serangan berbanding lurus dengan kemampuan negara tersebut untuk melakukan serangan. Posisi Tiongkok di peringkat ke-3 terkuat global dalam hal kekuatan militer, didukung oleh kepemilikan persenjataan militer yang canggih beserta kuantitas yang besar. Selain itu Tiongkok memiliki pengalaman dalam konflik militer, memiliki tentara terlatih dan memiliki kemampuan untuk bergerak secara

luas di berbagai negara yang disebut *People Liberation Army* (PLA) termasuk melakukan kegiatan spionase dengan maksud memperkuat militer Tiongkok di negara kawasan Pasifik Selatan (contoh kasus Tonga).

Selain itu, kemiliteran Tiongkok sudah dikenal luas di dunia karena mengikuti berbagai kerja sama kemiliteran dengan berbagai negara di dunia seperti tergabung dalam *United National Peace Keeping Operations* dan *Shanghai Cooperation Organisation*. Dengan *offensive capability* yang Tiongkok miliki, maka Tiongkok bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke provokasi lebih lanjut untuk menentang dan mengancam hegemoni Australia di Kawasan Pasifik Selatan.

Keempat, terkait dengan faktor terakhir yaitu *offensive intentions* yang dimiliki oleh Tiongkok dengan bertindak agresif dalam penyebaran pengaruh di kawasan Pasifik Selatan, sehingga seringkali kebijakan-kebijakan agresif ini menimbulkan gesekan kepentingan antara Tiongkok dengan Australia. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok yang menimbulkan ancaman antara lain adalah upaya pendanaan Tiongkok untuk membangun fasilitas militer Tiongkok di beberapa negara seperti mendapatkan kamp militer di Fiji dan Vanuatu, pembangunan kabel telekomunikasi laut di Kepulauan Solomon, pembangunan mega proyek infrastruktur baik di Fiji, Tonga, Samoa, Niue dan negara lain di kawasan Pasifik Selatan.

Tindakan lain yang juga bentuk *offensive intentions* Tiongkok adalah memberikan bantuan pinjaman lunak jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang dianggap banyak peneliti sebagai strategi jeratan hutang bagi negara-negara kawasan tersebut. Tindakan ini dalam jangka panjang akan membuat negara-

negara peminjam akan kesulitan mengembalikan hutang karena perekonomian yang lemah dan akhirnya berujung pada konflik domestik dan berimbas pada ketidakamanan kawasan regional yang dijaga Australia.

Berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok yang telah diteliti dalam riset melalui keempat faktor tersebut secara nyata memberikan ancaman bagi Australia, baik dalam hal pengaruh dan keamanan kawasan regional Pasifik Selatan. Karena ancaman yang diberikan oleh Tiongkok kedepannya dapat membahayakan keamanan Australia, seperti: Pertama, berupa ketidakpatuhan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terhadap Australia sebagai *order domestic politic* di kawasan tersebut. Kedua, sebagai negara yang bertugas menyebarkan demokrasi di kawasan, tindakan Tiongkok berdasarkan contoh Fiji dan Kepulauan Solomon dapat mengancam tugas Australia tersebut. Ketiga, Tiongkok jika dapat membangun infrastruktur militer di negara-negara kawasan Pasifik Selatan dapat langsung mengancam keamanan Australia dan stabilitas kawasan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- 2019 *World Population*. (2019, September 11). Retrieved September 11, 2019, from World Population Review: <http://worldpopulationreview.com/>
- Alami, A. N., Pudjiastuti, T. N., Bhakti, I. N., Elisabeth, A., Anggoro, K., & Sitohang, J. (2016). Kebijakan Pertahanan Australia dan Respon Negara-negara Asia Timur dan Selandia Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, 105-108.
- Andriana, M. D. (2019, October 9). *China-Solomon teken kerja sama dalam hubungan diplomatik baru*. Retrieved October 12, 2019, from Antaranews: <https://www.antaranews.com/berita/1104562/china-solomon-teken-kerja-sama-dalam-hubungan-diplomatik-baru>
- Australian Government. (2018). *Overview of Australia's aid program to Samoa: How are we helping*. Retrieved October 17, 2019, from Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/geo/samoa/development-assistance/Pages/development-assistance-in-samoa.aspx>
- Bran, D. P., & Jiawei, P. (2016). *Chinese Aid in the Pacific*. Retrieved October 16, 2019, from lowyinstitute.org: <https://chineseaidmap.lowyinstitute.org/#>
- Brant, D. P. (2015, February). *Chinese Aid in the Pacific: Cook Island Snapshot*. Retrieved October 16, 2019, from Lowy Institute: http://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/chinese_aid_in_the_pacific_cook_islands_snapshot_0.pdf
- Brant, D. P. (2015, February). *Chinese Aid in the Pacific: Samoa Snapshot*. Retrieved October 17, 2019, from Lowy Institute: http://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/chinese_aid_in_the_pacific_samoa_snapshot_0.pdf
- Brant, D. P. (2015, February). *Chinese Aid in the Pacific: Vanuatu snapshot*. Retrieved October 16, 2019, from Lowy Institute: http://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/chinese_aid_in_the_pacific_vanuatu_snapshot_0.pdf
- Brown, C. P. (2012, 10). Australian influence in the South Pacific. *Australian Defence Force Journal Issues no.189*, 66. Retrieved 03 26, 2019, from www.defence.gov.au: http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/Commanders/2012/07_Brown%20SAP%20Final%20PDF.pdf
- Chibariwe, A. (2018, April 19). *Will China's Next Military Base Be in Vanuatu?* Retrieved October 16, 2019, from the Trumpet: <https://www.thetrumpet.com/17160-will-chinas-next-military-base-be-in-vanuatu>
- Chinese Embassy spokesperson criticizes Australian media reports regarding the Black Rock Camp project*. (2018, September 24). Retrieved September 12, 2019, from Embassy of The People's Republic of China in The Republic of Fiji: <http://fj.china-embassy.org/eng/gdxw/t1598135.htm>
- Connoly, P. J. (2016). Engaging China's new foreign policy in the South Pacific. *Australian Journals of international affairs*, 17.
- Country Profile: Australia. (2005). *Library of congress - Federal research division*, 6.

- Daily , N. (2018, September 13). *Australian, Fijian Patrol Boats Conduct Joint Boarding Operations*. Retrieved September 18, 2019, from Fijisun: <https://fijisun.com.fj/2018/09/13/australian-fijian-patrol-boats-conduct-joint-boarding-operations/>
- DIA. (2019). *China Military Power: Modernizing a force to fight and win. Defense Intelligence Agency*, 19.
- Dibb, P., Hale, D., & Pince, P. (2006). *Asia's Insecurity. Survival: Global Politics and Strategy*, 18.
- Dugis, V. M. (2015). *Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik. Global & Strategis*, 4-17.
- DW. (2006, Desember 5). *Kudeta Militer di Fiji*. Retrieved September 11, 2019, from DW Made for minds: <https://www.dw.com/id/kudeta-militer-di-fiji/a-2956694>
- Ellis, & Devonshire, C. (2019, May 23). *Belt and road Pacific*. Retrieved September 18, 2019, from Silk Road Briefing: <https://www.silkroadbriefing.com/news/2019/05/23/chinas-belt-road-initiative-pacific-islands/>
- Febriani, W. (2018). *Kepentingan Australia dalam intervensi di kepulauan Solomon melalui Regional Assistance Mission to Solomon Island (RAMSI). Jurnal Fisip HI Unair*, 15-17.
- Firth, S. (2005). *Australia in international Politics: An Introduction to Australian foreign Policy*. Australia: Allen&Unwin.
- Gaglioti, F. (2009, 02 02). *World Socialist Web Site*. Retrieved 03 26, 2019, from Australian Threatens Fiji with suspension from Pacific Island Forum: <https://www.wsws.org/en/articles/2009/02/spif-f02.html>
- Gershaneck, k. k. (2018, September 7). *China's plan for conquest of the South Pacific*. Retrieved October 30, 2019, from Asia Times: <https://www.asiatimes.com/2018/09/article/chinas-plan-for-conquest-of-the-south-pacific/>
- GFP. (2019). *2019 Military Strength Ranking*. Retrieved September 11, 2019, from Global fire power: <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp#additionalNotes>
- Gries, P. H., Zhang, Q., Masuki, Y., & Lee, Y. W. (2008). *Historical beliefs and the perception of threat in Northeast Asia: colonialism, the tributary system, and China-Japan-Korea relations in twenty-first century. International relations of the Asia-Pacific Vol. 9*, 263.
- Guardian, T. (2018, November 9). *Marshall Islands president accuses China of backing opponents, fuelling political crisis to secure remote atoll*. Retrieved October 12, 2019, from South China morning Post: <https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/2172445/marshall-islands-president-accuses-china-backing-opponents>
- Guixia , L. (2015). *China's development aid to Fiji: motive and method . The Research Centre of the Pacific Island Countries, Liaocheng University*, 11.
- Haas, M. d. (2011, august). *The Shanghai Cooperation Organisation's momentum towards a mature security alliance*. Retrieved September 17, 2019, from researchgate:

- https://www.researchgate.net/publication/267242142_The_Shanghai_Cooperation_Organisation's_momentum_towards_a_mature_security_alliance
- Hameiri, S. (2015). China's 'charm offensive' in the Pacific and Australia's regional order. *The Pacific Review*, 1-24.
- Hannan, K., & Firth, S. (2015). Trading with the Dragon: Chinese trade, investment and development assistance in the Pacific island. *Journal of Contemporary China*, 879-880.
- Hanson, M. F. (2011, 04 01). China in The Pacific: The New Banker in Town. *Pacific Forum CSIS: Issues & Insight*, 1-23. Retrieved 03 26, 2019, from www.archive.lowyinstitute.org: <https://archive.lowyinstitute.org/publications/china-pacific-new-banker-town>
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hille, K. (2019, April 9). *Pacific islands: a new arena of rivalry between China and the US*. Retrieved October 17, 2019, from Financial Times: <https://www.ft.com/content/bdbb8ada-59dc-11e9-939a-341f5ada9d40>
- Hoadley, S. (2005). Pacific Island Security Management by New Zealand & Australia: Towards a new paradigm. *Center for Strategic Studies: New Zealand*, 10.
- Holland, J., & McDonald, M. (2010). Australian Identity, interventionism and the 'War on Terror'. In A. Siniver, *International Terrorism Post 9/11: Comparative Dynamics and* (pp. 6-7). London: Routledge.
- Humas Setkab. (2015, April 22). *RRT Akan Terlibat Dalam Pembangunan 24 Pelabuhan, 15 Airport, Dan 8.700 Km Jalan Kereta*. Retrieved October 22, 2019, from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: https://setkab.go.id/rrt-akan-terlibat-dalam-pembangunan-24-pelabuhan-15-airport-dan-8-700-km-jalan-kereta/?yop_poll_tr_id=&yop_poll_nonce-1_y55da22801f1d0=2bd28f9071
- Kuper, S. (2019, April 23). *Australia confirms Blackrock Camp MoU with Fiji*. Retrieved September 12, 2019, from Defence Connect: <https://www.defenceconnect.com.au/key-enablers/3921-australia-confirms-blackrock-camp-mou-with-fiji>
- Likou, L. (2017, January 28). *Samoa and Australia relations reach new high*. Retrieved October 17, 2019, from Samoa Observer: <https://www.samoaoobserver.ws/category/samoa/13761>
- List of war*. (2013, October 8). Retrieved September 9, 2019, from Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/list-of-wars-2031197>
- Litelnoni, K. (2019, September 22). *Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative: Kompetisi atau Sinkronisasi antara Indonesia dan Tiongkok*. Retrieved November 2, 2019, from Hipotesa Media: <https://medium.com/hipotesa-indonesia/poros-maritim-dunia-dan-belt-and-road-initiative-883e0d49ed55>
- Look North Policy. (2015). In M. Komai, *Fiji's Foreign Policy and the New Pacific Diplomacy* (p. 113). Acton ACT 2601, Australia: ANU Press.
- Maclellan, N. (2018, March 29). *Operation South Pacific?* Retrieved November 2, 2019, from Insidestory.org.au: <https://insidestory.org.au/operation-south-pacific/>

- McDonnell, S. (2014, 10 22). *abc.net.au*. Retrieved 03 26, 2019, from [www.abc.net.au: <http://www.abc.net.au/news/2014-10-22/whitlam-father-of-china-australia-relations-beijing/5832076>](http://www.abc.net.au/news/2014-10-22/whitlam-father-of-china-australia-relations-beijing/5832076)
- Mudaliar, C. (2018, October 4). *Australia outbids China to fund Fiji military base*. Retrieved September 12, 2019, from Lowy Institute: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/australia-outbids-china-fund-fiji-military-base>
- Mulugeta, K. (2014). *The Role of Regional Powers in the Field of Peace and Security: The Case of Ethiopia*. Addis ababa, Ethiopia: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- OECD Fiji. (2017). Retrieved 03 26, 2019, from [atlas.media.mit.edu: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/fji/#Imports](https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/fji/#Imports)
- Perdana, A. V. (2019, September 17). *Kepulauan Solomon Akui China Usai Terima Bantuan Rp 7 Triliun dari Beijing*. Retrieved October 12, 2019, from [International Kompas: https://internasional.kompas.com/read/2019/09/17/21063861/kepulauan-solomon-akui-china-usai-terima-bantuan-rp-7-triliun-dari?page=all](https://internasional.kompas.com/read/2019/09/17/21063861/kepulauan-solomon-akui-china-usai-terima-bantuan-rp-7-triliun-dari?page=all)
- Perry, n. (2019, July 10). *China's largesse in Tonga threatens future of Pacific nation*. Retrieved October 16, 2019, from [Startribune: http://www.startribune.com/china-s-largesse-in-tonga-threatens-future-of-pacific-nation/512512252/](http://www.startribune.com/china-s-largesse-in-tonga-threatens-future-of-pacific-nation/512512252/)
- Reilly, J. H. (2003). Dragon in Paradise: China Rising Star in Oceania. *The National Interest*, 94-104.
- Riordian, P. (2018 , September 7). *Australia beats China to funding Fiji base*. Retrieved September 12, 2019, from [The Australian: https://www.theaustralian.com.au/nation/defence/australia-beats-china-to-funding-fiji-base/news-story/60d05ca8eb2bec629080c2c844255bbd](https://www.theaustralian.com.au/nation/defence/australia-beats-china-to-funding-fiji-base/news-story/60d05ca8eb2bec629080c2c844255bbd)
- Rozi, K. (2019, May 28). *Australia-Cina Berebut Pengaruh di Kepulauan Pasifik*. Retrieved October 12, 2019, from [GATRA: https://www.gatra.com/detail/news/418832/internasional/australiacina-berebut-pengaruh-di-kepulauan-pasifik](https://www.gatra.com/detail/news/418832/internasional/australiacina-berebut-pengaruh-di-kepulauan-pasifik)
- Shepard, M. (2009). *Australia's Nation-Building: An assessment of its contribution to regional security in the pacific, and a new policy to guide its future* . Canberra: Division of Archaeology & Natural History (ANH), RSPAS, Australian National University (ANU).
- Shie, T. R. (2007). Rising Chinese Influence in the South Pacific: Beijings "Island Fever". *Asian Survey*, 307-326.
- Sinaga, L. C. (2016). Realitas dan Prospek Hubungan ASEAN-China. *ejournal.lipi*, 99.
- Singh, P. K. (2011). China's 'Military Diplomacy': Investigating PLA's participation in UNPKO. *Strategic Analysis*, 793-818.
- SIPRI. (2019). *Military expenditure (current USD)*. Retrieved September 11, 2019, from [The World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?contextual=default&end=2018&locations=CN-AU&start=2013&view=chart](https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?contextual=default&end=2018&locations=CN-AU&start=2013&view=chart)
- Storey, H. Y. (2002). *The China Threat: Perceptions, Myths and Reality*. London: Routledge.

- Thomas, N. (1990). Regional Politics, Ethnicity, and Customs in Fiji. *The Contemporary Pacific*, 131-146.
- UN. (2019). *Protecting civilian protecting peace*. Retrieved September 9, 2019, from United Nation Peacekeeping: <https://peacekeeping.un.org/en>
- Wade, G. (2016, August). *China's 'One Belt, One Road' initiative*. Retrieved September 18, 2019, from Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/ChinasRoad
- Wallis, J. (2012, August 30). *China's South Pacific Diplomacy*. Retrieved 17 august, 2019, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2012/08/chinas-south-pacific-diplomacy/>
- Walsh, M. (2018, July 9). *Pengaruh Indonesia ke Australia bisa lebih dahsyat dibanding ke Cina*. Retrieved from ABC News: <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-07-09/pengaruh-indonesia-ke-australia-bisa-lebih-besar-dibanding-china/9957442>
- Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 3-43.
- Wang, s. (2019). Overview of the measurement and improvement of military financial expenditure benefits. *Advances in economics, business and management research, Vol. 85*, 188.
- Wesley-Smith, T. (2013). China's Rise in Oceania: Issue and Perspective. *Pacific Affairs: Vol. 86 No. 2*, 362-363.
- Wesley-Smith, T., & Porter, E. (2010). *China in Oceania: Reshaping the Pacific?* New York: Berghahn Books.
- WorldBank. (2019). *GDP per capita growth (annual %)*. Retrieved September 17, 2019, from The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2018&locations=AU-CN&start=2013>
- Wroe, D. (2018, April 9). *China eyes Vanuatu military base in plan with global ramifications*. Retrieved October 16, 2019, from The Sydney Morning Herald: <https://www.smh.com.au/politics/federal/china-eyes-vanuatu-military-base-in-plan-with-global-ramifications-20180409-p4z8j9.html>
- Yang, J. (2011). China in Fiji: Displacing traditional players? *Australian Journal of International Affairs*, 318.
- Zhang, D. (2015, Desember 10). *Devpolicy@ANU*. Retrieved October 12, 2019, from Triangular aid cooperation: case of Te Mato Vai: <https://devpolicy.org/triangular-aid-cooperation-the-case-of-te-mato-vai-20151210/>